

LAPORAN KINERJA 2021



BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

Kata Pengantar

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban dalam satu tahun. Laporan ini memberikan gambaran pertanggungjawaban Basarnas dalam upaya memenuhi setiap target kerja dan pemakaian sumber daya yang digunakan.

Laporan akuntabilitas ini menggunakan metodologi penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan analisis antara target dan realisasi atas KPI (*Key Performance Indicator*) yang telah ditetapkan oleh Basarnas pada tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis Basarnas Tahun 2020-2024.

Penyusunan laporan kinerja ini diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (*good governance*).

Jakarta, Februari 2022

Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan



Henri Alfiandi
Marsekal Madya TN

Ikhtisar Eksekutif

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pada tahun 2021 capaian kinerja Basarnas adalah 101,52% dengan kategori “Berhasil”. Dari 6 (enam) indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian di atas 100%, 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian antara 94% - 98% dan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian 78%.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Basarnas melaksanakan beberapa usaha guna mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator masing-masing. Upaya tersebut antara lain peningkatan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas, melaksanakan latihan pencarian dan pertolongan, koordinasi dengan Potensi SAR, serta memberikan pelatihan bagi Tenaga SAR dan Potensi SAR. Capaian kinerja Basarnas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	45,77 %	36,11%	78,89%
		Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	92,89 %	87,82%	94,54%
		Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	100 %	98,67%	98,67%



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	83,67	88,12	105,31%
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	27 menit	18,07 menit	133,07%
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%	98,64%	98,64%



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar dan Grafik	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi	1
B. Isu Strategis	6
C. Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	12
B. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	13
C. Tujuan dan Sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	13
D. Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	16
E. Tujuan Strategis Sasaran Strategis dan Indikator Utama Basarnas	20
F. <i>Cascading</i> Sasaran Strategis ke Sasaran Program	23
G. Program dan Sasaran Program	23
H. Kinerja, Anggaran dan Aktifitas/Kegiatan (Rencana Aksi IKU Lembaga)	33
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	37
J. Alokasi Anggaran	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Capaian Kinerja	39
1. SS1 “Meningkatnya keandalan sumber daya”	40
2. SS2 “Meningkatnya kepuasan masyarakat”	51
3. SS3 “Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi”	56
B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja 2021 dengan Renstra Basarnas	71
C. Realisasi Anggaran	73
D. Kinerja Lainnya	76
BAB IV PENUTUP	82
A. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	82



B. Transformasi SKP	86
C. Kesimpulan dan Upaya Perbaikan	88
D. Daftar Pustaka.....	89

Lampiran – lampiran:

- Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Pengukuran Kinerja Tahun 2021
- Pernyataan telah Direviu Inspektorat



Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tujuan Strategis Sasaran Strategis dan Indikator Utama Basarnas Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.2 Cascading Sasaran Strategis ke Sasaran Program (Program Teknis)	24
Tabel 2.3. Perubahan Program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	27
Tabel 2.4. KRO Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	29
Tabel 2.5. Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	32
Tabel 2.6. Program Dukungan Manajemen (Keseekretarian)	33
Tabel 2.7. Performance Based Budgeting IKU Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	35
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Basarnas	37
Tabel. 3.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021	40
Tabel. 3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir	41
Tabel. 3.3. Realisasi Indikator pendukung Indikator “Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan”	42
Tabel. 3.4. Realisasi Indikator pendukung IKSS2 “Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan”	43
Tabel. 3.5. Realisasi Indikator pendukung IKSS3 “Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat”	44
Tabel. 3.6. Anggaran pendukung capaian SS1 “Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan”	45
Tabel. 3.7. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 IKSS4 “Indeks Kepuasan Masyarakat”	51
Tabel. 3.8. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir.....	52
Tabel. 3.9. Anggaran pendukung capaian SS2 “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan”.....	53
Tabel. 3.10. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 IKSS5 “Waktu tanggap pencarian dan pertolongan”	57
Tabel. 3.11. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir	57



Tabel. 3.12. Data Kecelakaan dan Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan selama Tahun 2021	57
Tabel. 3.13. Data Kecelakaan Tahun 2021	59
Tabel. 3.14. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 IKSS6	59
Tabel. 3.15. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir	60
Tabel. 3.16. Anggaran pendukung capaian SS3 “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan”	60
Tabel.3.17. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Strategis Basarnas	71
Tabel.3.18. Perubahan Program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73
Tabel.3.19. Pagu Anggaran dan Refocusing Covid-19.....	73
Tabel.3.20. Realisai Pagu Anggaran TA 2021	74



Daftar Gambar dan Grafik

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Basarnas	6
Gambar 2.1. Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024	22
Gambar 2.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dan Generik (Dukungan Manajemen)	25
Gambar 2.4. Komponen Perencanaan.....	26
Gambar 3.1. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Basarnas	39
Grafik. 3.1. Perbandingan Pemenuhan Tenaga Rescuer dan ABK Tahun 2021	66

BAB I PENDAHULUAN

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana disebutkan pada Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Basarnas merupakan Lembaga pemerintah non kementerian serta bertanggung jawab kepada Presiden. Organisasi dan tata kerja Basarnas selanjutnya diatur dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Perpres tersebut mengatur tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan hal-hal lain terkait kelembagaan Basarnas.

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kedudukan, tugas dan fungsi Basarnas adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam Pasal 1 ayat (1), Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam Pasal 2 ayat (1), Basarnas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan SAR;
- b. memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan SAR;
- c. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan SAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
- f. menyampaikan informasi penyelenggaraan SAR kepada masyarakat;
- g. menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi SAR secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan operasi SAR kepada masyarakat;
- h. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SAR; dan
- i. melakukan pemasyarakatan SAR.

3. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi SAR;
- b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi SAR, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
- c. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standardisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan Operasi SAR;
- d. perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi SAR;
- e. koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Operasi SAR, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
- f. pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi SAR;
- g. pelayanan informasi penyelenggaraan SAR;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang SAR;
- i. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang SAR;

- j. pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Basarnas;
- k. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Basarnas;
- l. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- m. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Basarnas

4. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Basarnas sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Basarnas.

2. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala yang dipimpin oleh Sekretaris Utama. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Basarnas. Sekretariat Utama terdiri atas Biro Perencanaan, Biro Umum serta Biro Hukum dan Kepegawaian.

3. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan

Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala yang dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, perumusan kebutuhan, perumusan dan pelaksanaan standarisasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi SAR, dan kesiapsiagaan serta perumusan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan

prosedur perizinan dan/atau rekomendasi dan pelayanan informasi penyelenggaraan SAR. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan terdiri atas Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan.

4. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala yang dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan serta bimbingan dan penyuluhan di bidang bina tenaga dan potensi SAR. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi.

5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala yang dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pengembangan dan pelaksanaan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi SAR. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan terdiri dari Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Komunikasi.

6. Inspektorat

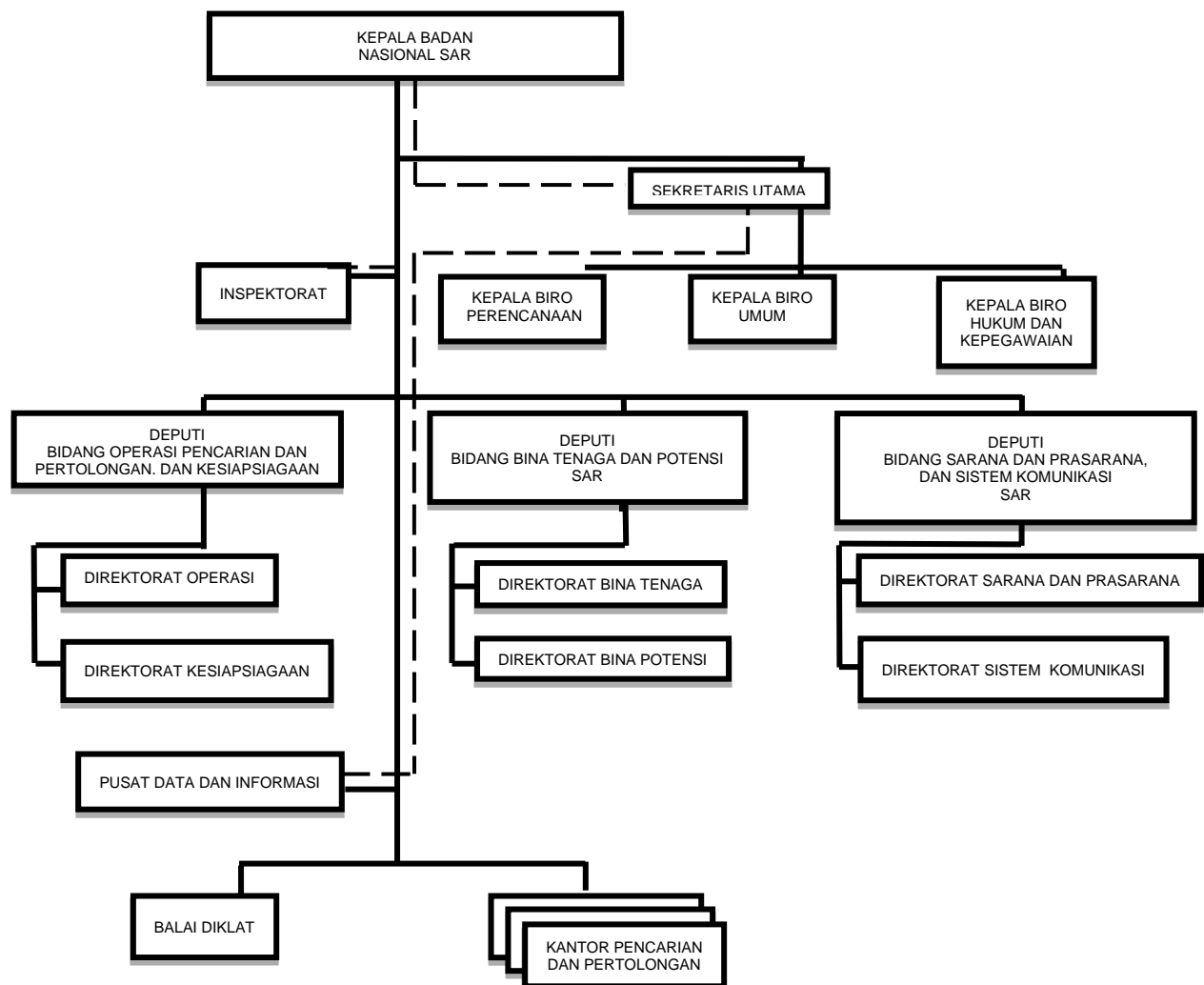
Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Basarnas. Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi SAR. Pusat Data dan Informasi terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Basarnas yang dipimpin oleh seorang Kepala. Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Basarnas.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Basarnas

B. Isu Strategis

Terdapat beberapa isu strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis Basarnas. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

1. SDM merupakan salah satu isu utama yang menjadi tantangan yang dihadapi Basarnas disetiap periode Renstra. Basarnas masih mengalami kekurangan SDM baik berupa petugas administrasi, Rescuer, Anak Buah Kapal (ABK) maupun tenaga teknis lainnya. Kekurangan tersebut disebabkan antara lain oleh pengembangan kelembagaan Basarnas berupa pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan, penambahan Pos

Pencarian dan Pertolongan serta adanya Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan penambahan sarana dan prasarana SAR berupa sarana SAR darat, sarana SAR laut dan sarana SAR udara.

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 880 Tahun 2011 tentang Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2021, Basarnas mendapatkan alokasi formasi calon pegawai negeri sipil sebanyak 350 orang yang terdiri dari 189 rescuer, 8 nakhoda, 66 ABK, 23 jabatan fungsional lainnya, serta 65 jabatan pelaksana.

2. Terkait penataan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan, Basarnas telah menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dengan melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselonisasi dan pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Pengalihan jabatan tersebut terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:
 - a. Pengalihan jabatan-jabatan struktural menjadi 15 jabatan administrator dan 38 jabatan pengawas sesuai Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/206/M.SM.02.00/2020 tanggal 14 April 2020; dan
 - b. Pengalihan jabatan-jabatan struktural menjadi 9 jabatan administrator dan 24 jabatan pengawas sesuai Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/697/M.SM.02.00/2020 tanggal 4 Nopember 2020.

Pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tersebut mendorong perubahan birokrasi Basarnas menjadi lebih efektif dan efisien. Pengalihan tersebut diikuti dengan penetapan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK-KBSN-197/OT.05/IX/BSN-2020 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di lingkungan Kantor Pusat, serta pelantikan para pemangku jabatan fungsional dan jabatan struktural pada Desember 2020.

Dengan penyederhanaan kelembagaan tersebut maka jumlah jabatan struktural di lingkungan Kantor Pusat Basarnas adalah sebagai berikut:

Jenis Jabatan	Penyederhanaan Birokrasi	
	Sebelum	Setelah
Jabatan Administrator (Eselon III)	27	5
Jabatan Pengawas (Eselon IV)	68	11

3. Keterlibatan potensi pencarian dan pertolongan saat ini belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Keterlibatan tersebut diperlukan terutama untuk mendukung pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Untuk menangani isu tersebut Basarnas setiap tahun mengajukan dan memperoleh anggaran pelatihan potensi yang merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional pemerintah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat Basarnas dan seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan.
4. Pemerintah belum mampu menyediakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Basarnas. Kekurangan anggaran tersebut mempengaruhi ketersediaan saran, prasarana dan peralatan SAR, serta peningkatan kompetensi SDM SAR. Sebagai alternatif pendanaan Basarnas telah mengusulkan anggaran melalui skema Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk membiayai pengadaan beberapa sarana SAR penting. Bantuan dari pihak lain juga telah diterima Basarnas antara lain berasal dari Pemerintah Daerah dalam bentuk tanah dan bangunan, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* badan usaha dalam bentuk pembangunan dan perbaikan prasarana.
5. Jumlah dan kemampuan sarana dan prasarana belum memadai bila dibandingkan dengan luas wilayah, kondisi geografis, dan jumlah operasi SAR. Untuk mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana SAR Basarnas memprioritaskan pengadaan sarana dan prasarana yang esensial dan terkait langsung dengan pelaksanaan operasi SAR. Selain itu, Basarnas memanfaatkan sisa anggaran belanja modal dan pemeliharaan untuk pemenuhan sarana dan prasarana.

6. Salah satu indikator dalam Renstra Basarnas 2020-2024 adalah kecepatan waktu tanggap (response time) yang pada tahun 2020 27.2 menit dan secara bertahap menjadi 25 menit pada tahun 2024. Meskipun response time Basarnas tahun 2021 mencapai 18.07 menit atau lebih cepat daripada target yang ditentukan, capaian tersebut tidak merata di seluruh jenis operasi dan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Untuk mempercepat response time Basarnas meningkatkan kesiapsiagaan sarana dan SDM. Peningkatan kesiapsiagaan sarana dilaksanakan dengan peningkatan kegiatan pemeliharaan dalam hal penyediaan anggaran dan penjadwalannya, sedangkan peningkatan kesiapsiagaan SDM dilaksanakan dengan penambahan jumlah pegawai dan peningkatan kompetensinya.
7. Seiring dengan peningkatan frekuensi terjadinya kecelakaan dan bencana Basarnas dituntut untuk meningkatkan kapabilitas penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, upaya tersebut antara lain dilaksanakan dengan membangun koordinasi dengan potensi SAR, baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, organisasi kemasyarakatan maupun perorangan. Upaya lain yang dilaksanakan adalah meningkatkan kerja sama internasional dengan negara lain maupun organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan. Basarnas juga berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SAR dengan melaksanakan kegiatan misalkan SAR Goes to School, pameran SAR, sosialisasi melalui media masa, maupun bentuk pemasyarakatan SAR lainnya.
8. Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Basarnas selama ini lebih banyak digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR dalam bentuk sistem deteksi dini, komunikasi pengerahan dan pengendalian operasi SAR, maupun koordinasi dengan potensi SAR dan otoritas SAR negara lain. TIK khususnya dalam bentuk digitallisasi belum dimanfaatkan secara optimal terutama untuk mendukung tugas kehumasan untuk mendukung *positioning* Basarnas, dan pelaksanaan tugas administrasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Basarnas mendorong seluruh unit kerja untuk lebih aktif memanfaatkan sosial media dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan tugas masing-masing dan pembangunan aplikasi serta pemanfaatan aplikasi yang telah

dibangun oleh K/L lain untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas administrasi.

9. Isu yang terkait dengan regulasi antara lain berupa pembuatan standar teknis diberbagai bidang, penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan, penyusunan dan peninjauan SOP, termasuk pembuatan instruksi kerja. Basarnas mendorong masing-masing unit kerja untuk menyusun standar teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing, menyusun dan meninjau ulang kurikulum dan silabus, SOP, serta instruksi kerja. Penyusunan regulasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peninjauan regulasi tersebut dilaksanakan secara berkala.

C. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 Bab

1. Bab I Pendahuluan memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Strategis memuat Peta Strategis Basarnas, ringkasan khtisar Renstra Basarnas, Cascading dari Sasaran Strategis ke sasaran Program, perjanjian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan. Penjelasan terkait redesain Program Basarnas dan menindaklanjutinya dengan penyusunan RO KRO serta Kegiatan/ Aktifitas yang akan dijadikan Rencana Aksi
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:
 - A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Strategis Basarnas

- C. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta adanya Refocusing Anggaran terkait Covid 19
 - D. Kinerja Lainnya, pada sub bab ini menyajikan kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama Tahun 2021.
-
- 4. Bab IV Penutup memuat simpulan umum atas capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk meningkatkan kinerjanya. Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Kementrian PAN RB yang berisi penjelasan terhadap langkah langkah serta tindak lanjut dari hasil rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun sebelumnya
 - 5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Pengukuran Kinerja Tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama periode Tahun 2020-2024. Renstra 2020-2024 selain dapat menjadi ukuran pencapaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama lima tahun juga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan digunakan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen perencanaan tersebut disusun untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun untuk pencapaian Target Kinerja dan Anggaran ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

A. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

"MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".

B. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, terutama Misi ke-7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, serta dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dan Misi ke-3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka ditetapkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut:

- M.1. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia.
- M.2. Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan

C. Tujuan dan Sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.1. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan sebagai berikut:

TN	Memperkuat pelayanan dasar keselamatan dan keamanan transportasi nasional
TS.1	Terselenggaranya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan
TS.2	Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional
TP.1	Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional
TP.2	Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal
TP.3	Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan
TP.4	Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
TP.5	Terwujudnya kelembagaan dan regulasi yang berkualitas

Tujuan Nasional (TN) merupakan tujuan skala nasional untuk bidang pencarian dan pertolongan, yang didalam RPJMN Tahun 2020-2024 termasuk ke dalam **PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama dalam KP4 Keselamatan dan Keamanan Transportasi**. Pelaksanaan Tujuan Nasional (TN) ini merupakan konsentrasi dari Pemerintah secara keseluruhan (dalam hal ini dikoordinir oleh Presiden dengan melibatkan K/L terkait, termasuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kemenhub, Kemen PUPR, dan K/L terkait lainnya) dalam memperkuat pelayanan dasar guna menciptakan keselamatan dan keamanan transportasi nasional.

Tujuan Strategis (TS) merupakan tujuan pada level K/L, dalam hal ini tujuan strategis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembankan oleh Presiden melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2016 yakni dalam menyelenggarakan bidang pencarian dan pertolongan.

Pelaksanaan Tujuan Strategis (TS) ini merupakan konsentrasi dari kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yakni dalam menyelenggarakan pemenuhan dan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan dan dalam menyelenggarakan layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional. Hal ini mencakup aspek meningkatnya ketersediaan dan keandalan sumberdaya (SDM tenaga dan potensi, sarana, prasarana, dan sistem komunikasi), meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (waktu tanggap dan tingkat keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan).

Tujuan Program (TP) merupakan tujuan pada level Unit Eselon I dalam melaksanakan program-program di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon I yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 8 Tahun 2017. Dalam hal ini terdapat 5 tujuan program (TP), yakni **TP.1 untuk Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, TP.2 untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, TP.3 untuk Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan, sedangkan TP.4 dan TP.5 untuk Sekretariat Utama.**

Memperhatikan struktur dari tujuan pada *Balanced Scorecard* (BSC) pada Gambar 2.1, maka tujuan yang akan diupayakan pencapaiannya pada level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah **Tujuan Strategis yakni (1) TS1 Terselenggaranya pemenuhan dan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan, serta (2) TS2 Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional.** Adapun Tujuan Nasional (TN) akan diupayakan pencapaiannya pada level Nasional (oleh Presiden berserta K/L terkait, termasuk didukung oleh pencapaian TS dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan). **Sedangkan Tujuan Program (TP) akan diupayakan pencapaiannya pada level Unit Eselon I di Lingkungan Badan**

Nasional Pencarian dan Pertolongan (untuk mendukung pencapaian TS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)..

D. Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan renstra yang menyebutkan 3 nomenklatur sasaran, yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
2. Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis K/L yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
3. Sasaran Kegiatan (SK) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Proses perumusan SS, SP, dan SK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang

pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam konteks ini, maka Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level *stakeholders perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), maka Sasaran Nasional (SN) terkait dengan bidang pencarian dan pertolongan (seperti yang telah dirangkum pada Naskah Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 adalah:

SN Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan pertolongan

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dalam hal ini, kepentingan pengguna jasa (*customers*) terkait layanan (*service*) pencarian pertolongan terdiri dari hal pokok, yakni: (1) ketersediaan layanan (*service availability*) ditunjukkan melalui penyediaan sumber daya pencarian dan pertolongan (yang mencakup: SDM, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi) yang memadai (cukup dan andal, sesuai kebutuhan minimal) sehingga menjangkau kejadian di seluruh wilayah NKRI, (2) kinerja layanan

(*service performance*) yang ditunjukkan melalui efektivitas dari kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan, yang ditandai oleh: (i) waktu tanggap (*response time* yang cepat) dan (ii) keberhasilan evakuasi yang tinggi, serta pada ujungnya (3) meningkatnya kepuasan masyarakat (*public satisfaction level*) terhadap layanan pencarian dan pertolongan.

Oleh karena itu, di dalam BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2020-2024 ditetapkan beberapa Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

- SS.1 Meningkatkan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan**
- SS.2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan**
- SS.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan**

3. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi ke deputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.

Dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini ditetapkan sejumlah Sasaran Program (SP) yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu:

Kedeputan Bina Tenaga dan Bina Potensi

- SP1 Meningkatkan kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP2 Meningkatkan kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan

Kedeputan Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi

- SP3 Meningkatkan keandalan sarana prasarana pencarian dan pertolongan
- SP4 Meningkatkan keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan

Kedeputan Operasi dan Kesiapsiagaan

- SP5 Meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan petolongan
- SP6 Meningkatkan kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama. Perspektif *Learning and Growth* (LGP) mencakup:

- SP7 Meningkatkan profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP8 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SP9	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
SP10	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
SP11	Meningkatnya kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan
SP12	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
SP13	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)

SP1 dan SP2 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, sedangkan SP3 dan SP4 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, adapun SP5 dan SP6 akan menjadi konsentrasi dari Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan

E. Tujuan Strategis Sasaran Strategis dan Indikator Utama Basarnas

Pada Tabel 2.1 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Adapun daftar Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Secara Detail **Manual Indikator Kinerja Basarnas** terdapat pada halaman Lampiran. IKU Basarnas telah dilegalkan pada Nomor: SK.KBSN-192/PR.01.03/IX/BSN-2020

Pada Gambar 2.1 adalah PETA STRATEGIS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan seperti pada penjelasan di atas



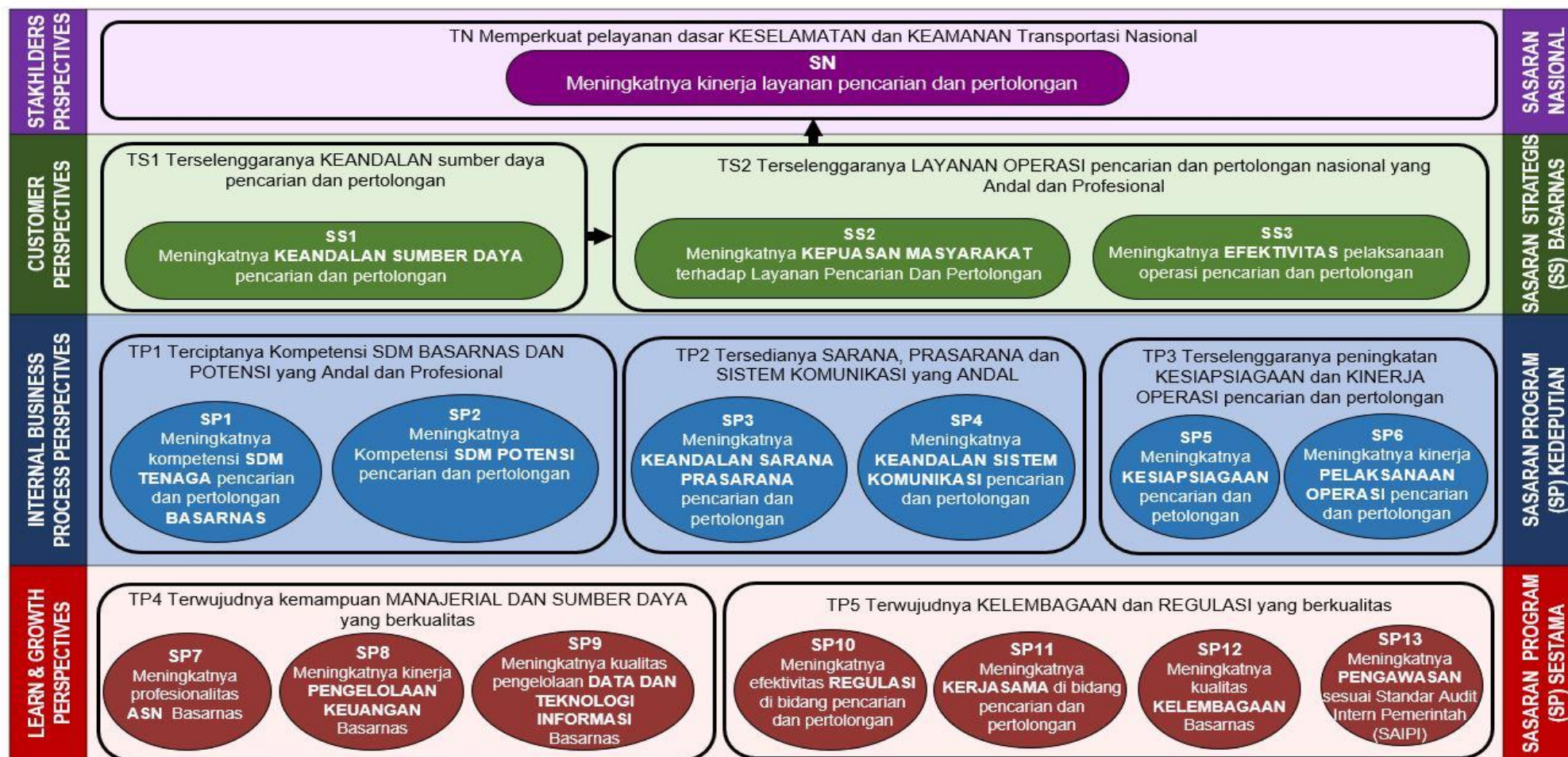
LAPORAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Tabel 2.1 Tujuan Strategis Sasaran Strategis dan Indikator Utama Basarnas Tahun 2020-2024

TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR UTAMA		Satuan	Rumusan
TS1	Terselenggaranya pemenuhan dan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	SS1	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS1	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
				IKSS2	Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
				IKSS3	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi yang telah memiliki sertifikat
TS2	Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional	SS2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS4	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
		SS3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS5	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
				IKSS6	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Gambar 2.1. Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Sumber: Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024

F. *Cascading* Sasaran Strategis ke Sasaran Program

Tabel *Cascading* dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel tersebut adalah tabel Penjenjangan Sasaran Strategis ke Sasaran Program berikut dengan Indikator Kinerjanya (Indikator Kinerja sasaran / IKSS dan Indikator Kinerja Program IKSP). Penggunaan Program yang dipakai adalah Program Teknis yaitu Program pengelolaan Pencarian dan Pertolongan.

G. Program dan Sasaran Program

Untuk memenuhi Sasaran Strategis, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan didukung oleh 2 Program yaitu **Program Teknis dan Program Generik**. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan. Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dan Generik dijelaskan pada Gambar 2.3.

Untuk melihat **ISI** dari 2 program tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Pada tabel tersebut termuat Tujuan Program, Sasaran Program sampai dengan Indikator Program.

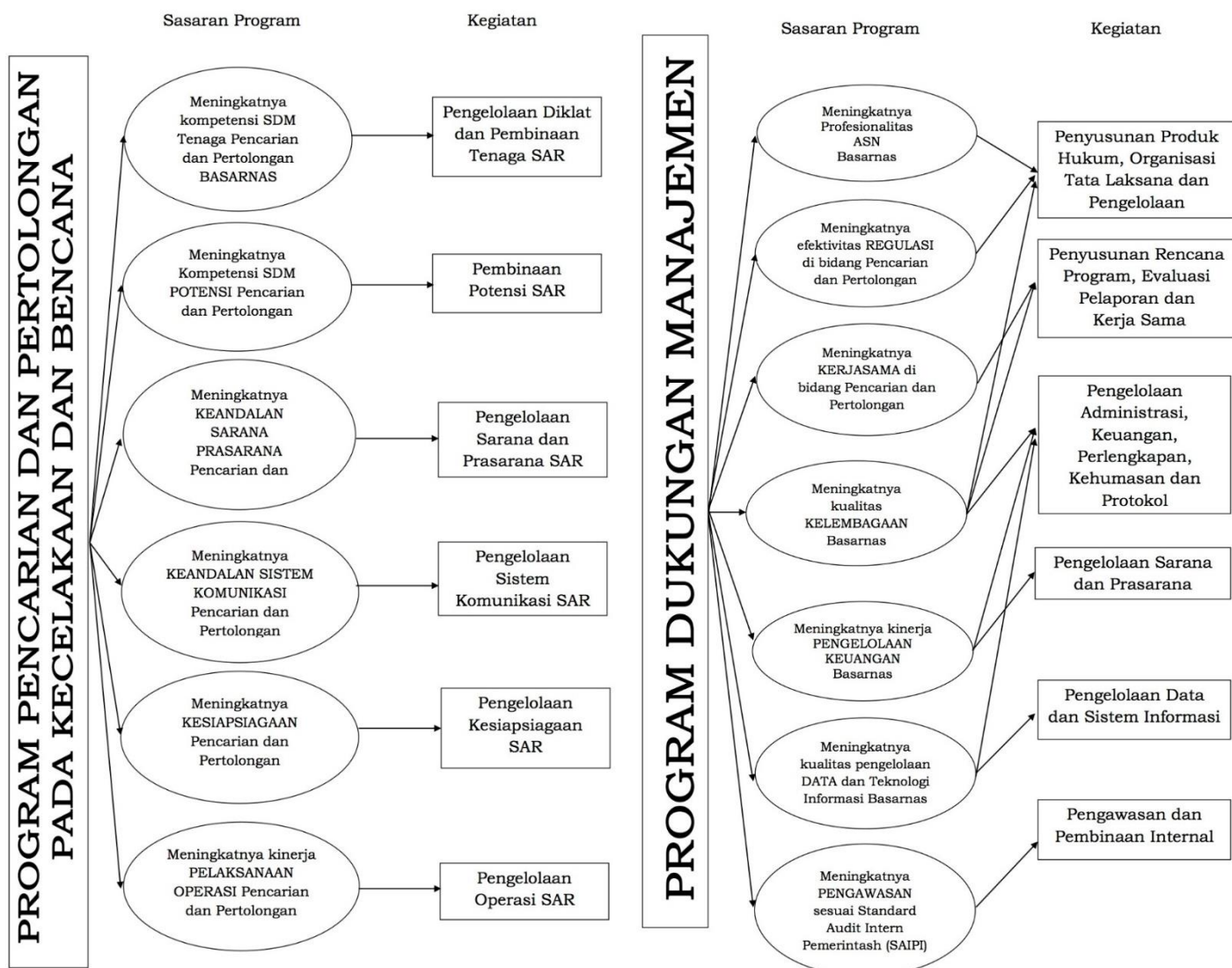
Untuk lebih dalam lagi, yaitu Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan sampai dengan Aktifitas dan Anggaran detail dapat dilihat pada Dokumen SAKIP :

1. Dokumen-dokumen SAKIP Unit Kerja Eselon 1 (4 Dokumen)
2. Dokumen-dokumen SAKIP Unit Kerja Eselon 2 (11 Dokumen)
3. Dokumen-dokumen SAKIP UPT (43 Dokumen)
4. Dokumen-dokumen SAKIP Balai Diklat (1 Dokumen)

Dokumen SAKIP tersebut akan di Upload pad E SAKIP KemenPAN dan RB sesuai tanggal dan waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2 Cascading Sasaran Strategis ke Sasaran Program (Program Teknis)

NO.	SASARAN STRATEGIS (LEMBAGA)	INDIKATOR KINERJA (LEMBAGA)		TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (Kedeputian/ Es. 1)	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (kedeputian/ Es. 1)		TARGET			
SS1	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS1	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	30,98%	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	SP3	Meningkatnya keandalan sarana prasarana pencarian dan pertolongan	IKSP.3.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	%		
								IKSP.3.2	Indeks pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan dalam menunjang operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks		
								IKSP.3.3	Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas Pencarian dan Pertolongan	%		
		IKSS2	Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	92,89%		SP1	Meningkatnya kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan	IKSP.1.1	Persentase peningkatan jumlah petugas pencarian dan pertolongan dan anak buah kapal (ABK) yang kompeten	%		
								SP4	Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	IKSP.4.1	Persentase pemenuhan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	%
										IKSP.4.2	Indeks pemenuhan dukungan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan serta pemenuhan pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya dalam menunjang operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks
		IKSP.4.3	Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi Pencarian dan Pertolongan	%								
		IKSP.4.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)	Indeks /Nilai								
		SS2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS4		Indeks kepuasan masyarakat	83,33%	SP2	Meningkatnya kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan	IKSP.2.1	Persentase keterlibatan SDM potensi pencarian dan pertolongan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	%
IKSP.2.2	Persentase pemahaman SDM potensi tentang pencarian dan pertolongan				%							
IKSP.2.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelatihan potensi Pencarian dan Pertolongan				Indeks /Nilai							
SS3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS5	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	27,2 menit	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	SP6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSP.6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks /Nilai		
								IKSP.6.2	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (<i>menit</i>)	menit		
								IKSP.6.3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	%		
		IKSS6	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%		SP6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSP.6.4	Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	%		
								IKSP.6.5	Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan	%		
								SP5	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan petolongan	IKSP.5.1	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	%
		IKSP.5.2	Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	%								
		IKSP.5.3	Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	%								



Gambar 2.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dan Generik (Dukungan Manajemen)



Gambar 2.4. Komponen Perencanaan

Pada Tahun 2021, Basarnas telah meredesain Sistem Perencanaan Penganggaran **Penganggaran terpadu** (*Unified Budget*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Dalam hal ini, perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terpadu dalam rangka mewujudkan prestasi kerja kementerian/lembaga.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budget*) Penganggaran berbasis kinerja mengutamakan upaya pencapaian output (keluaran) dan outcome (hasil) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan. Dengan tujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran kinerja untuk tingkat satuan kerja (Satker) dan kementerian/lembaga

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) merupakan sebuah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi anggaran yang dibutuhkan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Prakiraan Maju.

Manfaat Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

1. Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara Program, Kegiatan, output, dan outcome
2. Terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon I dalam mencapai sasaran pembangunan
3. Terwujudnya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga secara lebih optimal

4. Terwujudnya integrasi teknologi dan sistem informasi yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
5. Terwujudnya penataan organisasi yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja unit kerja di Kementerian Lembaga
6. Terwujudnya keterkaitan dan keselarasan antara Visi dan Misi Presiden dengan Fokus Pembangunan, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan serta Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
7. Terciptanya rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, dan Keluaran (output) yang mencerminkan “real work (eye cathcing)”
8. Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya overlapping antar Kegiatan dan Output Program

Ruang Lingkup Program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

1. Program Generik

Merupakan program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi)

2. Program Teknis

Merupakan program yang didesain untuk menjalankan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP

Tabel 2.3. Perubahan Program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Semula	Menjadi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Dukungan Manajemen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Basarnas	
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

Setelah merumuskan Redesain Program, pada Tahun 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan tindakan lebih lanjut yaitu :

1. Merumuskan nomenklatur Sasaran (*Outcome*) Program

2. Sasaran (*Outcome*) Program mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional
3. Merumuskan Indikantor Kinerja Utama Program
4. Indikator kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif
5. Merumuskan nomenklatur *Output* Program
6. *Output* Program merupakan keluaran yang dihasilkan oleh K/L untuk terwujudnya *outcome*

Defenisi KRO dan RO

1. Klasifikasi Rincian *Output* (KRO), yang merupakan kumpulan atas keluaran (*output*) Kemeterian/Lembaga. Setara dengan *Output*
2. Rincian *Output* (RO), Keluaran (*output*) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga. Setara dengan Sub *Output*.

Penyusunan Satuan KRO dan RO

1. Referensi KRO dan RO disusun dengan disertai satuan yang berlaku umum dan/atau sudah diuji kelayakannya
2. Satuan yang digunakan pada KRO dan RO mampu mengukur kinerja dan volume terkait pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan

Penyusunan RO di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

1. Tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta tugas dan fungsi unit kerja pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Keluaran (*Output*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait struktur organisasi dan tata kelola Kementerian/Lembaga
2. Peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, peraturan lain terkait bidang/sektor/tema program yang diampu oleh Kementerian/Lembaga tersebut

Tabel 2.4. KRO Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Kegiatan	Semula (Output)	Menjadi (KRO)
Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Perencanaan (952)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran internal (EAB)
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (953)	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (EAL)
	Layanan Kerja Sama (101)	Kerja Sama (AEC)
	Layanan Dukungan Manajemen Satker (970)	

Kegiatan	Semula (Output)	Menjadi (KRO)
Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Hukum (957)	Layanan Hukum (EAG)
	Layanan Bantuan Hukum (969)	
	Layanan Manajemen Organisasi (960)	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (EAH)
	Layanan Reformasi Birokrasi (961)	
	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) (954)	Layanan SDM (EAF)
	Layanan Pendidikan Kedinasan (968)	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal (EAM)
	Layanan Dukungan Manajemen Satker (970)	

Kegiatan	Semula (Output)	Menjadi (KRO)
Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan Perkantoran (994)	Layanan Perkantoran (EAA)
	Layanan Manajemen Keuangan (955)	Pengelolaan Keuangan Negara (FAH)
	Layanan Umum (962)	Layanan Umum (EAC)
	Layanan Manajemen Barang Milik Negara (BMN) (956)	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (958)	Layanan Kehumasan dan Protokoler (EAI)
	Layanan Protokoler (959)	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker (970)	

Kegiatan	Semula (Output)	Menjadi (KRO)
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (951)	Layanan Sarana Internal (EAD)
		Layanan Prasarana Internal (EAE)
Pengawasan dan Pembinaan Internal	Layanan Audit Internal (965)	Layanan Pengawasan Internal (EAK)
		Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan (DCF)
	Layanan Umum (962)	Layanan Umum (EAC)

Kegiatan	Semula (Output)	Menjadi (KRO)
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Layanan Data dan Informasi (963)	Layanan Data dan Informasi (EAJ)
	Layanan Umum (962)	Layanan Umum (EAC)
	Pengelolaan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional) (101)	Sarana Bidang Konektivitas Udara (PN) (RAD)
	Pengelolaan Teknologi Informasi (102)	Sarana Bidang Konektivitas Udara (CAD)
	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (103)	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara (CCD)

Kegiatan	Semula (Output)	Menjadi (KRO)
Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pengelolaan Operasi SAR (Prioritas Nasional) (101)	Operasi Bidang Penanganan Bencana (PN) (QHC)
	Pengelolaan Operasi SAR (102)	Operasi Bidang Penanganan Bencana (BHC)
		Koordinasi (AEA)
		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (AFA)
Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Pengelolaan Perencanaan dan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR (101)	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (AFA)
	Pengelolaan Siaga SAR (102)	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (BKA)
	Pengelolaan Latihan SAR (103)	Koordinasi (AEA)

Kegiatan	Semula (Output)	Menjadi (KRO)
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR (PN) (101)	Sarana Pertahanan dan Keamanan (PN) (RAF)
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR (102)	Sarana Pertahanan dan Keamanan (CAF)
		Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan (PN) (RBM)
		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (AFA)
		Koordinasi (AEA)
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SAR (103)	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan (CCF)
		OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan (CDM)

Kegiatan	Semula (Output)	Menjadi (KRO)
Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional) (101)	Sarana Bidang Konektivitas Udara (PN) (RAD)
	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR (102)	Sarana Bidang Konektivitas Udara (CAD)
		Koordinasi (AEA)
		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (AFA)
	Pemeliharaan Sistem Komunikasi SAR (103)	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara (CCD)

Kegiatan	Semula (Output)	Menjadi (KRO)
Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Pembinaan Tenaga SAR (101)	Pelatihan Bidang penanganan bencana (DCK)
	Pengelolaan Diklat (102)	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (AFA)
Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Pembinaan Potensi SAR (Prioritas Nasional) (101)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN) (QDC)
	Pembinaan Potensi SAR (102)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (BDC)
		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (AFA)

Tabel 2.5. Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan						
TUJUAN PROGRAM		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		Satuan
TP1	Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SP1	Meningkatnya kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan	IKSP.1.1	Persentase peningkatan jumlah petugas pencarian dan pertolongan dan anak buah kapal (ABK) yang kompeten	%
				IKSP.2.1	Persentase keterlibatan SDM potensi pencarian dan pertolongan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan	%
		SP2	Meningkatnya kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan	IKSP.2.2	Persentase pemahaman SDM potensi tentang pencarian dan pertolongan	%
				IKSP.2.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelatihan potensi Pencarian dan	Indeks /Nilai
TP2	Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SP3	Meningkatnya keandalan sarana prasarana pencarian dan pertolongan	IKSP.3.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	%
				IKSP.3.2	Indeks pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan dalam menunjang operasi Pencarian dan	Indeks
				IKSP.3.3	Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas Pencarian dan Pertolongan	%
		SP4	Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	IKSP.4.1	Persentase pemenuhan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	%
				IKSP.4.2	Indeks pemenuhan dukungan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan serta pemenuhan pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya dalam menunjang operasi Pencarian dan	Indeks
				IKSP.4.3	Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi Pencarian dan	%
				IKSP.4.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)	Indeks /Nilai
				IKSP.5.1	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	%
TP3	Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SP5	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan petolongan	IKSP.5.2	Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	%
				IKSP.5.3	Persentase peningkatan penyusunan dokumen standarisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	%
		SP6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSP.6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi Pencarian dan	Indeks /Nilai
				IKSP.6.2	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan (menit)	menit
				IKSP.6.3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan	%
				IKSP.6.4	Persentase pemenuhan dukungan operasi Pencarian dan Pertolongan	%
				IKSP.6.5	Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan	%

Tabel 2.6. Program Dukungan Manajemen (Kesekretariatan)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Basarnas						
TUJUAN		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		Satuan
TP4	Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SP7	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian	IKSP.7.1	Penilaian mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Nilai
		SP8	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan	IKSP.8.1	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	%
				IKSP.8.2	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
		SP9	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional	IKSP.9.1	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor
TP5	Terwujudnya kelembagaan dan regulasi yang berkualitas	SP10	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSP.10.1	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	%
		SP11	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSP.11.1	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	%
		SP12	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.12.1	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai
				IKSP.12.2	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75
				IKSP.12.3	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai
		SP13	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah	IKSP.13.1	Meningkatnya kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level

Total biaya (TA 2021) untuk masing masing Program dapat dilihat penjelasan berikut ini. Untuk IKU Lembaga semua ada di Program Teknis (kedeputian) sedangkan Program Kesekretariatan sesuai *dengan Balance scoreCard* pada Gambar 2.1 ada di *Learn and Growth* yaitu program Pendukung (Program Dukungan Manajemen)

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Rp**859.573.479.000,-**
2. Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan Rp**1.407.886.781.000,-**

H. Kinerja, Anggaran dan Aktifitas/Kegiatan (Rencana Aksi IKU Lembaga)

Keterkaitan antara Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Kegiatan, dan kegiatan / Aktifitas dan anggaran yang muncul dalam rangka menunjang Sasaran Strategis (IKU Lembaga) dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini. Dimana seluruh Anggaran dan Kegiatan / Aktifitas yang timbul dalam mendukung Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah dengan **PROGRAM PENGELOLAAN PENCARIAN, PERTOLONGAN dan PENYELAMATAN** yang ada TA 2021 senilai Rp**1.407.886.781.000,-**

Kesimpulannya adalah seluruh biaya yang timbul dalam rangka menunjang Sasaran dan Indikator Strategis Basarnas didukung oleh Program Pengelolaan Pencarian Pertolongan dan Penyelamatan dari 3 Kedeputan Teknis :

1. Kedeputan Bina Tenaga dan Bina Potensi
2. Kedeputan Sarana Prasana dan Sistem Komunikasi
3. Kedeputan Operasi dan Kesiapsiagaan

Dalam menentukan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) perlu melihat detail sampai dengan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan aktifitas apa saja yang telah dilakukan yang pencapaiannya melalui *cascading* ke eselon 2. Tabel berikut adalah Kegiatan/ aktifitas dari Program Teknis Pengelolaan Pencarian dan Pertolongan yang dapat diklarifikasi pada Dokumen-dokumen SAKIP kedeputan. Dari tabel 5.1 tersebut akan dipantau dan dikendalikan secara berkala melalui :

- Aplikasi E Performance (per Bulan)
- Laporan Triwulan Basarnas (per Triwulan)

Dari tabel 2.7. juga dapat dilihat dan dipantau/ dikendalikan :

1. Kinerja
2. Anggaran
3. Fisik Pekerjaan / Kegiatan/ Aktifitas
4. Pemantauan Aktifitas yang menjadi PRIORITAS NASIONAL (PN)



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Tabel 2.7. *Performance Based Budgeting* IKU Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN 2021	PAGU (Rp.) TA 2021	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM (Kedepuitan / Es.1)	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (Direktorat/ Es. 2))	KEGIATAN
1.	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	30,98%	Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan	Pengelolaan Tenaga SAR.	1 Dok	51.663.000.000	Kedepuitan Bina Tenaga dan Bina Potensi	Dit.Bina Tenaga	Kegiatan Pengelolaan Tenaga SAR meliputi: Pelaksanaan penyiapan tenaga SAR, Pelaksanaan sertifikasi tenaga SAR, dan Pengelolaan jabatan fungsional.
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR (Prioritas Nasional/PN)	6 Paket	1.044.200.000.000	Kedepuitan Sarana, Prasarana dan Sistem Konunikasi	Dit. Sarana dan Prasarana	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR (Prioritas Nasional) meliputi: Sarana SAR Helikopter, Rescue Boat, RIB, Rubber Boat, Rescue CAR, Rescue Truck.
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	1 Paket	41.957.266.000	Kedepuitan Sarana, Prasarana dan Sistem Konunikasi	Dit. Sarana dan Prasarana	Kegiatan Dukungan Sarana dan Prasarana SAR , Sarana SAR Lainnya, dan Peralatan SAR Lainnya
					Pengadaan Peralatan Komunikasi dan Teknologi Informasi (PN)	6 Paket	166.932.512.000	Kedepuitan Sarana, Prasarana dan Sistem Konunikasi	Dit. Sistem Komunikasi	Pengadaan Peralatan Komunikasi dan Teknologi Informasi, Pengadaan Base Communication System (termasuk Prioritas Nasional)
	Tingkat keandalan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	92,89%	Pemeliharaan Sarana dan prasarana SAR		44 Paket	41.957.266.000	Kedepuitan Sarana, Prasarana dan Sistem Konunikasi	Dit. Sarana dan Prasarana	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana SAR meliputi: Pemeliharaan Peralatan SAR, Pemeliharaan Sarana Darat, Pemeliharaan Sarana Laut, Pemeliharaan Sarana Udara	
			Inventarisasi dan Pemeliharaan Komunikasi SAR		1 Dok	38.182.503.000	Kedepuitan Sarana, Prasarana dan Sistem Konunikasi	Dit. Sistem Komunikasi	Kegiatan Inventarisasi dan pemeliharaan komunikasi SAR meliputi: Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit.	
			Pengelolaan Tenaga SAR		1 Dok	51.663.000.000	Kedepuitan Bina Tenaga dan Bina Potensi	Dit. Bina Tenaga	Kegiatan Pengelolaan Tenaga SAR meliputi: Pelaksanaan penyiapan tenaga SAR, Pelaksanaan sertifikasi tenaga SAR, dan Pengelolaan jabatan fungsional.	
Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	90%	Pembinaan Potensi SAR	1 Dok		42.399.000.000	Kedepuitan Bina Tenaga dan Bina Potensi	Dit. Bina Potensi	Kegiatan Pengelolaan Potensi SAR meliputi: Pelaksanaan Penyiapan Potensi SAR, Pelaksanaan sertifikasi Potensi SAR, Pelaksanaan Pemasyarakatan SAR		
		Perencanaan dan Standardisasi Operasi SAR	1 Dok		78.710.000.000	Kedepuitan BinGaPot, Sarpras Siskom dan Oerasi Kesiasiagaan	Dit. Operasi, Dit. Bina Potensi dan Dit. Komunikasi	Kegiatan Perencanaan dan Standarisasi Operasi SAR meliputi: Rapat Kerja Teknis SAR dan Menyusun bahan pelayanan informasi operasi pencarian dan pertolongan bencana dan kondisi membahayakan manusia sesuai dengan prosedur		
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	85%		Pembinaan Potensi SAR	1 Dok	42.399.000.000	Kedepuitan Bina Tenaga dan Bina Potensi	Dit. Bina Potensi	Kegiatan Pengelolaan Potensi SAR meliputi: Pelaksanaan Penyiapan Potensi SAR, Pelaksanaan sertifikasi Potensi SAR, Pelaksanaan Pemasyarakatan SAR
					Penyiapan Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi	1 Dok	166.932.000.000	Kedepuitan Sarana, Prasarana dan Sistem Konunikasi	Dit. Sistem Komunikasi	Kegiatan Penyiapan Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi ini meliputi: Pelaksanaan Penyiapan Dukungan Komunikasi SAR, Pelaksanaan Sertifikasi Pemancar Sinyal Marabahaya.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN 2021	PAGU (Rp.) TA 2021	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM (Kedeputian / Es.1)	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (Direktorat/ Es. 2))	KETERANGAN
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	27,2 menit	Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan	Siaga	44 Paket	23.980.000.000	Kedeputian Operasi dan Kesiapsiagaan	Dit. Kesiapsiagaan	Kegiatan Siaga SAR meliputi: Siaga Rutin, Siaga Lebaran, Siaga Natal, Siaga SAR Khusus 2020
					Latihan SAR	1 Paket	23.980.000.000	Kedeputian Operasi dan Kesiapsiagaan	Dit. Kesiapsiagaan	Kegiatan Latihan SAR meliputi: Latihan Malindo, Indopura, Ausindo, Marpolex, Nasional SAR Challenge, Indonesia-Srilanka, Indonesia-Timor Leste
					Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara (PN)	1 Dok	78.710.000.000	Kedeputian Operasi dan Kesiapsiagaan	Dit. Operasi	Kegiatan ini meliputi: Uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal, pesawat udara, bencana dan kondisi membahayakan manusia, Rapat Koordinasi SAR Nasional, Rapat Kerja Teknis SAR Nasional, IMO dan ICAO Meeting Group.
					Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi bencana dan kondisi membahayakan manusia (PN)	1 Dok	78.710.000.000	Kedeputian Operasi dan Kesiapsiagaan	Dit. Operasi	Kegiatan ini meliputi: INSARAG Meeting Group, Workshop Manajemen Posko
	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%	Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara (PN)		1 Dok	78.710.000.000	Kedeputian Operasi dan Kesiapsiagaan	Dit. Operasi	Kegiatan ini meliputi: Uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal, pesawat udara, bencana dan kondisi membahayakan manusia, Rapat Koordinasi SAR Nasional, Rapat Kerja Teknis SAR Nasional, IMO dan ICAO Meeting Group.	
			Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi bencana dan kondisi membahayakan manusia (PN)		1 Dok	78.710.000.000	Kedeputian Operasi dan Kesiapsiagaan	Dit. Operasi	Kegiatan ini meliputi: INSARAG Meeting Group, Workshop Manajemen Posko	
			Pembinaan Potensi SAR		1 Dok	42.399.000.000	Kedeputian Bina Tenaga dan Bina Potensi	Dit. Bina Potensi	Kegiatan Pengelolaan Potensi SAR meliputi: Pelaksanaan Penyiapan Potensi SAR, Pelaksanaan sertifikasi Potensi SAR, Pelaksanaan Pemasarakatan SAR	
			Pengelolaan Tenaga SAR		1 Dok	51.663.000.000	Kedeputian Bina Tenaga dan Bina Potensi	Dit. Bina Tenaga	Kegiatan Pengelolaan Tenaga SAR meliputi: Pelaksanaan penyiapan tenaga SAR, Pelaksanaan sertifikasi tenaga SAR, dan Pengelolaan jabatan fungsional.	
			Diklat SAR		23 Angkatan	14.098.000.000	Kedeputian Bina Tenaga dan Bina Potensi	Kepala Balai Diklat	Diklat SAR merupakan salah satu kegiatan dalam mencapai target "Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan".	

Sumber : Kompilasi Dokumen SAKIP dan Laporan Kinerja Eselon 2 (BAWAHAN LANGSUNG ESELON 1)

I. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Basarnas

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	30,98%
		Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	92,89%
		Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	100%
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	83,33%
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	27,2 menit
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%

Perjanjian Kinerja Antara Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan para Eselon 1 (Kedeputian dan sekretariat) sesuai dengan Sasaran Program dan Indikator Program yang dapat dilihat pada tabel 2.3 dan 2.4,

Peranjian Kinerja Antara para Eselon 1 (Kedeputian dan sekretariat) dengan para Eselon 2 dibawahnya dapat dilihat pada dokumen-dokumen SAKIP dan laporan Kinerja pada masing masing Unit Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Peranjian Kinerja Antara Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan para Kepala UPT (44 UPT) juga dapat dilihat pada dokumen-dokumen SAKIP dan laporan kinerja pada masing masing Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di daerah.

J. Alokasi Anggaran

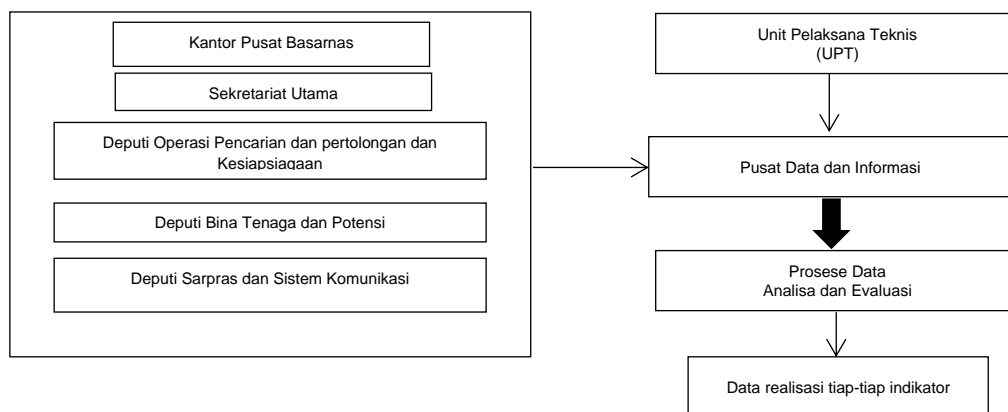
Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Basarnas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.267.460.260.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | Rp. 859.573.479.000,- |
| 2. Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan | Rp. 1.407.886.781.000,- |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada Bab ini akan dijabarkan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021. Pelaporan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja Basarnas Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target (rencana) dan Realisasi dari tiap-tiap indikator. Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari seluruh Unit Kerja di lingkungan Basarnas dari tiap eselon pada Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan 44 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia, baik data administratif maupun data teknis. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Berikut adalah mekanisme pengumpulan data kinerja Basarnas.



Gambar 3.1. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Basarnas

1. SS1 “Meningkatnya keandalan sumber daya”

SS1 ini didukung oleh 3 indikator yaitu Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum Indikator ini mengukur rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Basarnas, Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan, Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat. Berikut ini akan dijabarkan terkait capaiannya:

a. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Tabel. 3.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1)	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan (IKSS1)	45,77%	36,11%	78,89%
2)	Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (IKSS2)	92,89%	87,82%	94,54%
3)	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (IKSS3)	100%	98,67%	98,67%

Sumber data: Direktorat Sarana dan Prasarana, Bina Tenaga, Direktorat, Direktorat Bina Potensi, Direktorat Sistem Komunikasi

Tabel. 3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1)	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan (IKSS1)	2020	30,98%	34,74%	112,17%
		2021	45,77%	36,11%	78,89%
2)	Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (IKSS2)	2020	92,89%	89,03%	95,84%
		2021	92,89%	87,82%	94,54%
3)	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (IKSS3)	2020	100%	90,38%	90,38%
		2021	100%	98,67%	98,67%

Berikut adalah perhitungan untuk indikator kinerja pendukung capaian “Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan”.

- 1) **IKSS1** “Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan” dihitung dari persentase pemenuhan kebutuhan tenaga *rescuer* dan ABK.
- 2) **IKSS2** “Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan” dihitung dari pemenuhan sarana dan prasarana selama Tahun 2021. Dasar yang digunakan adalah Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 tentang Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- 3) **IKSS3** “Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat” dihitung dari tenaga *rescuer* dan ABK serta potensi pencarian dan pertolongan yang memiliki sertifikat.
- 1) **IKSS1** “Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan” dihitung dari persentase pemenuhan akan kebutuhan tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Basarnas.

Tabel. 3.3. Realisasi Indikator pendukung Indikator “Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan”

No.	Indikator Kinerja	Realisasi
a)	Persentase pemenuhan tenaga pencarian dan pertolongan	32,54%
b)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	34,13%
c)	Persentase pemenuhan sistem komunikasi Basarnas	41,66%
Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan		36,11%

Sumber data dari Bagian Kepegawaian, Direktorat Bina Tenaga, Direktorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Sistem Komunikasi, Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- a) Persentase pemenuhan tenaga pencarian dan pertolongan dihitung dari persentase pemenuhan kebutuhan akan tenaga *rescuer* dan ABK. Kebutuhan akan pemenuhan tenaga *rescuer* sebanyak 5.940 orang, jumlah saat ini sebanyak 1.910 orang atau sebesar 32,15%. Sedangkan untuk jumlah akan pemenuhan tenaga ABK sebesar 1.302 orang, jumlah tenaga saat ini sebanyak 468 orang atau sebesar 35,94%. Dari perhitungan tenaga *rescuer* dan ABK sampai dengan saat ini diperoleh persentase pemenuhan tenaga

pencarian dan pertolongan sebesar 32,54%. Untuk menutupi kekurangan tenaga baik rescuer maupun ABK Basarnas melakukan perekrutan tenaga honor/PPNPN.

- b) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dihitung dari pemenuhan sarana dan prasarana Tahun 2021. Dasar yang digunakan adalah Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 tentang Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- c) Persentase pemenuhan sistem komunikasi Basarnas dihitung dari pemenuhan peralatan sistem komunikasi Tahun 2021. Untuk pemenuhan sistem komunikasi, Basarnas pada Tahun 2021 melakukan pengadaan peralatan sistem komunikasi.

2) **IKSS2** “Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Indikator ini mengukur rata-rata tingkat keandalan/kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan tugas pencarian dan pertolongan. Berikut adalah realisasi **IKSS2**:

Tabel. 3.4. Realisasi Indikator pendukung **IKSS2** “Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan”

No.	Indikator Kinerja	Realisasi
1)	Persentase kesiapan sarana dan prasarana	87,53%
2)	Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	88,10%
Persentase tingkat kesiapan sarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan		87,82%

Sumber data dari Direktorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Sistem Komunikasi, Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3) **IKSS3** “Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting. SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi, perusahaan/ instansi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi / instansi.

Pada indikator kinerja ini menghitung SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang meliputi tenaga ABK dan *Rescuer* serta potensi pencarian dan pertolongan yang bersertifikat. Berikut adalah realisasi **IKSS3**:

Tabel. 3.5. Realisasi Indikator pendukung **IKSS3** “Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat”

No.	Indikator Kinerja	Realisasi
a)	Persentase ABK yang bersertifikat	100%
b)	Persentase <i>Rescuer</i> yang bersertifikat	100%
c)	Persentase Potensi pencarian dan pertolongan yang bersertifikat	97,34%
Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat		98,67%

Sumber data Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja **SS1** “Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan” didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya anggaran. Anggaran yang digunakan sebagai dukungan pencapaian kinerja pada sasaran ini akan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.6. Anggaran pendukung capaian **SS1** “Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan”

No.	Indikator Kinerja	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	a. Penyiapan Tenaga SAR	24.230.685.111.000	
		b. Pengelolaan Jabatan SAR	445.144.500.000	
		c. Pengadaan Sarana (PN)		
		d. Pengadaan Peralatan Komunikasi dan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)		
2	Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	a. Pemeliharaan Sarana dan prasarana SAR	374.659.674.833	
		b. Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	23.901.263.550	
3	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	c. Sertifikasi Tenaga SAR	1.228.805.527	
		d. Sertifikasi Potensi SAR	1.528.392.786	

Sumber data: Laporan Triwulan IV 2021 dan Aplikasi Simonev

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berikut adalah penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja **SS1** “Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan” diantaranya:

- Penyebab capaian **IKSS1** “Persentase pemenuhan sumber daya pencarian dan pertolongan” tidak tercapai diantaranya yaitu:
 - Belum terpenuhinya jumlah sarana sesuai dengan standart (Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 tentang Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).
 - Adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.
- Penyebab capaian **IKSS2** “Prosentase kesiapan sarana dan prasarana serta peralatan sistem komunikasi” tidak tercapai diantaranya yaitu:
 - Adanya beberapa sarana yang rusak.
 - Lokasi docking kapal yang jauh sehingga membuat proses docking menjadi lama.
 - Tidak adanya bengkel dealer resmi sehingga mengalami kesulitan ketika akan memperbaiki sarana.
 - Kesulitan untuk mendapatkan *spare part* sehingga menghambat proses perbaikan sarana.
 - Masih adanya Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan belum memiliki tanah sendiri.
 - Adanya tower rapling yang rusak.
- Penyebab capaian **IKSS3** “Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat” belum tercapai diantaranya yaitu masih adanya tenaga potensi pencarian dan pertolongan yang tidak mengikuti pelatihan Bimtek maupun uji kompetensi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung **SS1** “Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan” ini adalah sebagai berikut:

1) **IKSS1** “Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan” kegiatan-kegiatan yang mendukung meliputi:

a) **Penyiapan Tenaga SAR**

- Telah dilaksanakan rapat pembinaan kompetensi tenaga rescuer pada bulan Februari 2021.
- Telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Refreshment Rotary Wing (Single Engine R44 dan Multi Engine AS355) Serta Initial Type Rating Multi Engine AS365 terhadap 2 (dua) orang Pilot ASN
- Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut ANT-II dan ATT-II di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP).
- Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Perawatan Luka Dasar Bagi Perawat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 18 s.d 22 September 2021 di Hotel Amarossa Bekasi.
- Telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut ANT-II dan ATT-II di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) dari tanggal 25 Mei - 28 Oktober 2021.
- Telah dilaksanakan Training For Crew Helicopter di Satud PP serta Lanudal Tanjung Pinang dan Surabaya.
- Telah terlaksana pembayaran PPNPN tenaga pengawakan kapal dari bulan Januari s.d. Desember 2021.
- Telah terlaksana pembayaran PPNPN tenaga pendukung Pencarian dan Pertolongan dari bulan Januari s.d. Desember 2021.

b) **Pengelolaan Jabatan Fungsional**

- Telah dilaksanakan sosialisasi jabatan fungsional kepada rescuer Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari bulan Januari s/d Maret 2021.

- Telah dilaksanakan pengelolaan administrasi jabatan fungsional kepada rescuer Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui aplikasi di ruang lab. pusdatin dari bulan Januari s/d Maret 2021.
- Telah dilaksanakan penilaian dan pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal 30 Agustus s/d 1 September 2021.

c) Pengadaan Sarana

Berikut ini pengadaan sarana Basarnas selama Tahun 2021:

- Pengadaan Rigid Inflatable Boat Kelas 1 (Pemotongan 2020)
- Pengadaan Rigid Inflatable Boat Kelas 2 Pemotongan 2020
- Pengadaan Rubber Boat Ukuran 4,25 Meter (pemotongan 2020)
- Pengadaan Landing Craft/Rubber Boat
- Pengadaan Rescue Truk 4 WD
- Pengadaan Peralatan Urban SAR
- Pengadaan Hoist Helikopter
- Pengadaan peralatan selam
- Pengadaan Rapid Deployment Tactical Tent (pemotongan 2020)
- Pengadaan Perlengkapan Crew Helikopter (pemotongan 2020)
- Renovasi Hanggar (pemotongan 2020)
- Pengadaan Peralatan Pendukung Uji Kompetensi
- Pengadaan Public Safety Diving Equipment
- Modifikasi Kemampuan Sistem ROV
- Pengadaan Night Vision Equipment
- Pengadaan Outboard Motor Waterjet
- Pengadaan Stick Probe
- Pengadaan Peralatan Pencarian Bawah Air Portable
- Under Water Searching Device
- Pengadaan Polyethylene Boat
- Pengadaan Double Stabilizer Boat HDPE
- Peralatan Deteksi korban Reruntuhan (Radar SAR)

d) Pengadaan peralatan komunikasi dan teknologi informasi

Berikut ini pengadaan peralatan komunikasi dan teknologi informasi Basarnas selama Tahun 2021:

- Pengadaan communicating supporting equipment
- Pengadaan Base Communication System
- Pengembangan Sistem Pemantauan Sinyal Mara Bahaya Cospas Sarsat
- Pengadaan Peralatan Komunikasi Satelit Wifi Marine
- Pengadaan Peralatan Direction Finder
- Pekerjaan Optimalisasi Jaring Sistem Komunikasi

2) **IKSS2** “Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan” kegiatan-kegiatan yang mendukung meliputi:

a) Pemeliharaan Sarana dan prasarana SAR

Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan guna menunjang layanan pencarian dan pertolongan.

b) Pemeliharaan Peralatan Komunikasi

Pemeliharaan Peralatan Komunikasi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan Peralatan Komunikasi dilakukan guna menunjang layanan pencarian dan pertolongan khususnya untuk melakukan verifikasi berita kecelakaan/bencana dengan *Preliminary Comumunication (Precom)* dan *Extended Comumunication (Excom)*.

3) **IKSS3** “Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat” kegiatan-kegiatan yang mendukung meliputi:

a) Sertifikasi Tenaga SAR

- Telah dilaksanakan Penyusunan Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional.

- Telah dilaksanakan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Tk. Terampil yang diikuti sebanyak 43 orang peserta perwakilan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari hasil kegiatan 11 orang dinyatakan tidak lulus.
- Telah dilaksanakan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Tk. Mahir yang diikuti sebanyak 24 orang peserta perwakilan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari hasil kegiatan 7 orang dinyatakan tidak lulus.
- Telah dilaksanakan persiapan witness LSP tanggal 7 Januari 2021.
- Telah dilaksanakan Witness LSP tanggal 8-11 Februari 2021 di Hotel Amarosa Grande Bekasi.
- Telah dilaksanakan Remedial Ukom pada tanggal 16-26 Juni 2021 via Zoom.
- Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pra Asesmen di Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, pada tanggal 19 April 2021.
- Telah dilaksanakan Pra Asesmen di Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta tanggal 19 April 2021.
- Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pra Asesmen di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, pada tanggal 20 April 2021.
- Telah dilaksanakan asesmen di Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung, pada tanggal 27-30 Mei 2021.
- Telah dilaksanakan Pra Asesmen di Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, tanggal 26-28 Mei 2021.
- Telah dilaksanakan kegiatan Asesmen Lembaga Sertifikasi Profesi Basarnas di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang tanggal 30 Agustus s/d 3 September 2021.
- Telah dilaksanakan Uji Kompetensi tanggal 7 s.d 10 Oktober 2021 untuk jenjang Pemula diikuti 2 orang peserta. Dari hasil kegiatan 1 orang dinyatakan tidak
- Uji Kompetensi untuk Jenjang mahir yang diikuti 35 orang peserta. Dari hasil kegiatan 2 orang dinyatakan tidak lulus dan jenjang peyelia sebanyak 3 orang.

b) Sertifikasi Potensi SAR

- Telah dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Database Potensi di Golden Boutique Hotel Jakarta pada Februari 2021.
- Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Penguji Kompetensi di Bogor Jawa Barat pada Juni 2021
- Telah dilaksanakan Penyusunan Materi di Jakarta pada tanggal 21 s.d. 23 Oktober 2021.
- Telah dilaksanakan Uji Kompetensi Potensi di Banjarmasin dan Manado pada bulan September dan di Jayapura, Timika, dan Biak pada bulan November 2021.
- Telah dilaksanakan kegiatan Pengujian Materi di Banten pada Desember 2021.

2. SS2 “Meningkatnya kepuasan masyarakat”

a. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja **SS1** “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan” didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu “Indeks kepuasan masyarakat”. Pengukuran **IKSS4** ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk data survei diambil melalui kuisioner yang diisi oleh responden sebagai partisipasinya terhadap layanan pencarian dan pertolongan yang telah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama Tahun 2021 berikan kepada masyarakat .

Tabel. 3.7. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021
IKSS4 “Indeks Kepuasan Masyarakat”

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan masyarakat	83,67	88,12	105,31%

Sumber data : Direktorat Operasi, Direktorat Sistem Komunikasi, Direktorat Bina Potensi

Tabel. 3.8. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	2020	83,33	87,01	104,42%
	2021	83,67	88,12	105,31%

Penilaian IKM ada 3 yaitu IKM terhadap layanan operasi dan pencarian, IKM terhadap unit layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan, dan IKM terhadap registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya. Berikut ini hasil penilaian IKM Basarnas selama Tahun 2021:

- 1) Rata-rata nilai IKM hasil survei pada unit layanan operasi pencarian dan pertolongan Tahun 2021 yaitu 88,11.

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
86,72	86,85	88,84	90,02

Sumber data : Direktorat Operasi

- 2) Rata-rata nilai IKM hasil survei pada unit layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan Tahun 2021 yaitu 85,32.

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
84,94	84,19	87,85	84,31

Sumber data : Direktorat Bina Potensi

- 3) Rata-rata nilai IKM hasil survei terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya selama Tahun 2021 yaitu 90,92.

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
90,32	92,99	93,09	87,27

Sumber data :

Direktorat Sistem Komunikasi

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja **SS2** “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan” didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya anggaran. Anggaran yang digunakan sebagai dukungan pencapaian kinerja pada **SS2** adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.9. Anggaran pendukung capaian **SS2** “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan”

No.	Indikator Kinerja	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Indeks kepuasan masyarakat	a. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Pemasyarakatan Potensi SAR c. Penyiapan Dukungan	209.674.900	Pada bulan September 2021 terdapat revisi anggaran ke dua dari Rp. 160.000.000 menjadi Rp.58.200.000. revisi sebesar Rp. 101.800.000,-

No.	Indikator Kinerja	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
		Komunikasi dan Sertifikasi	3.706.275.093 318.692.926	Kegiatan meliputi Sosialisasi Sistem Deteksi Dini dan Registrasi Alat Pemancar Sinyal Mara Bahaya

Sumber data : Laporan Triwulan IV 2021

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan capaian kinerja **SS2** “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan” Tahun 2021 diantaranya adanya koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara Badan Nasional Penarian dan Pertolongan dengan Instansi/Organisasi lainnya. Hal tersebut menyebabkan adanya respon positif masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan yang diberikan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung **SS2** “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan” ini adalah sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Tahun 2021 Tanggal 5 s/d 8 April 2021 di hotel Orchard Jayakarta Jakarta.

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Tahun 2021 Tanggal 28 s/d 30 September 2021 di di Kansar Ternate.

2) Pelaksanaan Pemasyarakatan Potensi SAR

- Telah dilakukan Pembinaan SAR Bagi Pramuka pada bulan Februari 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Telah dilaksanakan Bimtek Penyuluh Pencarian dan Pertolongan untuk instruktur dan penyuluh pada Januari 2021 di Bogor, Jawa Barat.
- Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan SAR Community pada bulan Januari di Wonosobo dan pada bulan April di Surabaya.
- Telah dilaksanakan kegiatan Supervisi SGTS pada bulan April di Pangkal Pinang, pada bulan Mei di Gorontalo, dan pada bulan Juni di Cilacap.
- Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Potensi SAR Dasar pada tanggal 28 Februari - 4 Maret 2021 di Cirebon, 21 - 25 Maret 2021 di Kendari, 28 Maret - 1 April 2021 di Denpasar, dan 4 - 8 April 2021 di Surabaya .
- Telah dilaksanakan kegiatan Supervisi SGTS di Mamuju pada bulan Agustus 2021.
- Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek Kepramukaan untuk Instruktur pada bulan Juni 2021 di Tangerang.
- Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Potensi SAR Dasar pada bulan September 2021 di Tasikmalaya, Manado, dan Pekanbaru.
- Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan SAR Community pada bulan September 2021 di Surabaya dan Gorontalo, pada bulan November 2021 di Bandung dan Banten, dan pada bulan Desember 2021 di Lampung.
- Telah dilaksanakan kegiatan Pemasyarakatan, Sosialisasi, dan Penyuluhan Pencarian dan Pertolongan di Labuan Bajo.
- Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Potensi SAR Dasar pada bulan November 2021 di Pontianak, Lampung, Medan, Magelang, Pati, dan Bogor.

3) Penyiapan Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi

- Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Deteksi Dini di Pangkalan Bunn, Jambi, Makassar dan Banjarmasin.
- Telah dilaksanakan Rapat Registrasi Pemancar Sinyal Marabahaya.

3. SS3 “Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi”

SS3 didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Waktu tanggap pencarian dan pertolongan (**IKSS5**), Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (**IKSS6**).

a. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Berikut akan dijabarkan capaian masing-masing indikator kinerja yang mendukung sasaran ini::

1) **IKSS5** “Waktu tanggap pencarian dan pertolongan”

Indikator kinerja ini dihitung dari terima berita hingga SRU siap diberangkatkan. Waktu tanggap pencarian dan pertolongan terhadap penanganan kecelakaan baik kecelakaan kapal, pesawat udara, kecelakaan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia memiliki rumus perhitungan capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian waktu tanggap} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

“Semakin tinggi realisasi (waktu) menunjukan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi

Tabel. 3.10. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021
IKSS5 “Waktu tanggap pencarian dan pertolongan”

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1)	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	27 menit	18,07 menit	133,07%

Sumber data : Direktorat Operasi

Tabel. 3.11. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	2.015	28 menit	15,00 menit	146,43%
2020	2.536	27,2 menit	16,29 menit	140,11%
2021	2.264	27 menit	18,07 menit	133,07%

Sumber data : Direktorat Operasi, Laporan Kinerja Tahun 2019 dan 2020

Berikut ini disajikan realisasi waktu tanggap pencarian dan pertolongan pada penanganan kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia yang ditangani Basarnas selama Tahun 2021.

Tabel. 3.12. Data Kecelakaan dan Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan selama Tahun 2021

NO	KANTOR SAR	PESAWAT	KAPAL	BENCANA	KMM	LAKA PENANGANAN KHUSUS (KPK)	TOTAL RT SETAHUN	TOTAL OPS SETAHUN	RATA RATA RT
1	Banda Aceh	-	25	-	61	3	1428,75	89	16,05
2	Medan	-	21	8	53	2	2006,85	84	23,89
3	Padang	-	8	8	57	3	1138,44	76	14,98
4	Pekanbaru	-	26	3	29	-	839,00	58	14,47
5	Jambi	1	7	-	28	2	635,00	38	16,71
6	Bengkulu	-	8	2	17	-	407,20	27	15,08
7	Palembang	-	12	1	30	-	645,00	43	15,00



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO	KANTOR SAR	PESAWAT	KAPAL	BENCANA	KMM	LAKA PENANGAN AN KHUSUS (KPK)	TOTAL RT SETAHUN	TOTAL OPS SETAHUN	RATA RATA RT
8	Lampung	-	10	3	22	1	491,89	36	13,66
9	Tanjung pinang	-	17	3	20	-	1714,40	40	42,86
10	Pangkalpinang	-	24	4	17	-	1112,50	45	24,72
11	Natuna	-	12	1	5	-	406,00	18	22,56
12	Mentawai	-	17	-	2	-	300,00	19	15,79
13	Banten	-	15	-	17	-	608,99	32	19,03
14	Jakarta	1	5	2	47	-	566,05	55	10,29
15	Bandung	-	13	15	90	4	2081,73	122	17,06
16	Semarang	-	13	12	108	3	2363,90	136	17,38
17	Surabaya	-	33	10	121	4	3194,03	168	19,01
18	Yogyakarta	-	-	1	30	10	654,00	41	15,95
19	Denpasar	-	26	3	52	3	1577,71	84	18,78
20	Mataram	-	15	4	26	1	991,00	46	21,54
21	Kupang	-	16	4	17	-	704,70	37	19,05
22	Maumere	-	14	7	10	-	492,90	31	15,90
23	Pontianak	-	46	10	27	-	1323,51	83	15,95
24	Balikpapan	-	29	8	24	-	1174,80	61	19,26
25	Banjarmasin	-	17	7	35	1	1082,04	60	18,03
26	Manado	-	12	3	18	-	654,97	33	19,85
27	Gorontalo	-	15	7	19	-	608,02	41	14,83
28	Palu	-	23	6	20	-	948,50	49	19,36
29	Makassar	-	40	13	47	1	1584,39	101	15,69
30	Kendari	-	49	-	27	-	1388,76	76	18,27
31	Ambon	-	54	1	19	1	1006,80	75	13,42
32	Ternate	-	30	1	11	-	778,00	42	18,52
33	Sorong	-	25	2	11	-	708,00	38	18,63
34	Manokwari	-	8	1	12	-	463,00	21	22,05
35	Biak	-	23	-	5	-	410,00	28	14,64
36	Jayapura	-	8	1	9	-	180,00	18	10,00
37	Timika	1	19	-	14	-	649,98	34	19,12
38	Merauke	1	13	-	2	-	246,00	16	15,38
39	Palangkaraya	-	6	3	6	-	285,00	15	19,00
40	Cilacap	-	13	1	37	2	999,96	53	18,87
41	Tarakan	-	19	1	8	-	504,90	28	18,03
42	Mamuju	-	8	4	18	1	580,49	31	18,73
43	Nias	-	17	4	15	-	970,00	36	26,94
JUMLAH		4	811	164	1.243	42	40.907	2.264	18,07

Sumber data : Direktorat Operasi

2) **IKSS6** “Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan”

Capaian indikator kinerja ini merupakan perhitungan dari persentase jumlah korban yang selamat dan meninggal dibagi jumlah total korban kecelakaan/ bencana yang dilaporkan/ terdata. Berikut ini dapat dilihat rumus perhitungan persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

$$\% \text{ korban ditemukan} = \frac{(\sum \text{korban selamat} + \sum \text{korban meninggal})}{\text{Total} \sum \text{korban (selamat, meninggal, hilang)}} \times 100\%$$

Tabel. 3.13. Data Kecelakaan Tahun 2021

NO	JENIS OPERASI SAR	KEJADIAN	SELAMAT	MENINGGAL	HILANG
1	Kecelakaan Pesawat Udara	4	127	62	3
2	Kecelakaan KAPAL	811	4.811	441	401
3	Bencana	164	38.936	599	87
4	KMM	1.243	637	997	153
5	Kecelakaan Khusus	42	205	63	2
JUMLAH		2264	44716	2162	646

Sumber data : Direktorat Operasi

Tabel. 3.14. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021
IKSS6 “Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan”

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2)	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100	98,64%	98,64%

Tabel. 3.15. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Tahun	Jumlah Total Korban	Jumlah Korban Ditemukan/ Evakuasi	Persentase
2019	38.572	38.103	98,78%
2020	62.578	62.063	99,18%
2021	47.524	46.878	98,64%

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja **SS3** “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan” didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya anggaran. Anggaran yang digunakan sebagai dukungan pencapaian kinerja pada **SS3** adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.16. Anggaran pendukung capaian **SS3** “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan”

No.	Indikator Kinerja	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1)	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	a. Siaga SAR b. Latihan SAR c. Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara d. Pengerahan Potensi dan Pengendalian	7.785.484.297 2.180.849.476 882.548.924	Kegiatan ini pada bulan September 2021 terkena efisiensi anggaran.

No.	Indikator Kinerja	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
		Bencana dan Kondisi Membayakan Manusia	299.103.820	Kegiatan Insarag Meeting Group terkena efisiensi Anggaran
		e. Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (PN)	6.722.188.486	<p>Pada bulan Agustus 2021 telah dilaksanakan revisi anggaran / pergeseran anggaran pengerahan dan pengendalian operasi SAR Kantor Pusat ke anggaran pengerahan dan pengendalian operasi SAR 14 Kantor SAR yaitu Kantor SAR Mamuju, Pontianak, Jambi, Semarang, Kupang, Bandung, Banjarmasin, Medan, Palangkaraya, Cilacap, Pangkalpinang, Balikpapan, Tarakan, dan Surabaya total sebesar Rp. 5.828.764.000,-</p> <p>Pada bulan Oktober 2021 telah dilakukan revisi anggaran/pergeseran anggaran</p>



No.	Indikator Kinerja	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
				pengerahan dan pengendalian operasi SAR Kantor Pusat ke anggaran pengerahan dan pengendalian operasi SAR 6 Kantor SAR yaitu Kantor SAR Manokwari, Timika, Makassar, Mentawai, Ambon, Pekanbaru, total sebesar Rp. 2.179.468.000,-
2)	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	a. Diklat SAR b. Penyiapan Tenaga SAR c. Pengelolaan Jabatan SAR d. Pembinaan Potensi SAR e. Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara f. Pengerahan Potensi dan Pengendalian Bencana dan Kondisi Membayakan Manusia	3.677.237.057 24.230.685.111.000 445.144.500.000 1.528.392.786 882.548.924	Kegiatan ini pada bulan September 2021 terkena efisiensi anggaran. Kegiatan Insarag Meeting Group



No.	Indikator Kinerja	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
		g. Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (PN)	299.103.820	terkena efisiensi Anggaran
			6.722.188.486	<p>Pada bulan Agustus 2021 telah dilaksanakan revisi anggaran / pergeseran anggaran pengerahan dan pengendalian operasi SAR Kantor Pusat ke anggaran pengerahan dan pengendalian operasi SAR 14 Kantor SAR yaitu Kantor SAR Mamuju, Pontianak, Jambi, Semarang, Kupang, Bandung, Banjarmasin, Medan, Palangkaraya, Cilacap, Pangkalpinang, Balikpapan, Tarakan, dan Surabaya total sebesar Rp. 5.828.764.000,-</p> <p>Pada bulan Oktober 2021 telah dilakukan revisi anggaran/pergeseran anggaran pengerahan dan</p>



No.	Indikator Kinerja	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
				pengendalian operasi SAR Kantor Pusat ke anggaran pengerahan dan pengendalian operasi SAR 6 Kantor SAR yaitu Kantor SAR Manokwari, Timika, Makasar, Mentawai, Ambon, Pekanbaru, total sebesar Rp. 2.179.468.000,-

Sumber data : Laporan Triwulan IV 2021 dan aplikasi Simonev

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja **SS3** “Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” Tahun 2021 diantaranya:

- Penyebab capaian kinerja **IKSS5** “waktu tanggap pencarian dan pertolongan” telah mencapai target diantaranya yaitu:
 - Telah dilaksanakan Siaga SAR yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor dan Pos pencarian dan pertolongan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan selama 24 jam.
 - Adanya kerjasama dengan instansi/organisasi terkait.
 - Telah dilaksanakan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan
 - Telah dilaksanakan Diklat Dasar SAR maupun Lanjutan SAR guna meningkatkan kompetensi tenaga *rescuer*.
- Penyebab capaian kinerja **IKSS6** “Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” belum mencapai target diantaranya yaitu:
 - Cuaca ekstrim sehingga menyebabkan proses evakuasi tidak lancar.
 - Masih kurangnya Peralatan maupun sarana pencarian dan pertolongan yang digunakan untuk layanan pencarian dan pertolongan.
 - masih kurangnya SDM yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya tenaga *rescuer* dan ABK. Jumlah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga *rescuer* yaitu 5.940 orang, saat ini jumlah tenaga *rescuer* yang dimiliki sebanyak 1.910 orang atau 32,15%. Sedangkan untuk tenaga ABK jumlah untuk pemenuhan tenaga ABK sebanyak 1.302 orang, saat ini yang dimiliki sebanyak 468 orang atau 35,94%.

Untuk menambah kekurangan tenaga tersebut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menambah tenaga honor/ Pegawai Negeri Non PNS (PPNPN). Tenaga *rescuer* dengan status tersebut sebanyak 135 orang dan tenaga ABK sebanyak 291 orang.

Grafik. 3.1. Perbandingan Pemenuhan Tenaga Rescuer dan ABK Tahun 2021



d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung **SS3** “Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” ini adalah sebagai berikut:

1) **IKSS5** “Waktu tanggap pencarian dan pertolongan” kegiatan-kegiatan yang mendukung meliputi:

a) Siaga SAR

Siaga SAR dilaksanakan untuk mendukung kesiapan Basarnas dalam memberikan layanan operasi pencarian dan pertolongan, baik kesiapan personel maupun sarana yang akan digunakan. Melalui siaga SAR baik siaga rutin, siaga *rescue boat*, siaga *rescuer*, siaga operator radio, siaga logistik dan siaga humas selama 24 jam yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor dan Pos pencarian dan pertolongan, Basarnas dapat memberikan layanan pencarian dan pertolongan dengan cepat, tepat dan handal.

b) Latihan SAR

Kegiatan Latihan SAR selama Tahun 2021, sebagai berikut:

- Rapat persiapan dan koordinasi dengan pihak AMSA Australia.
- Pelaksanaan Latihan SAR AUSINDO pada tanggal 3 s.d. 7 Agustus 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang.

- Survei lokasi latihan DPSP Borobudur pada tanggal 2 s.d. 4 Juni 2021.
 - Rapat koordinasi latihan DPSP di Mandalika, Mataram.
 - Pelaksanaan simulasi penyelamatan kecelakaan pada tanggal 6-10 Mei 2021 di jalan tol layang Jakarta-Cikampek.
 - Pelaksanaan Latihan SAR Malindo pada tanggal 7 s.d. 8 Desember 2021 di Kansar Tarakan.
- c) Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
- Telah dilaksanakan kegiatan Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 8 s.d 12 Maret 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya.
 - Telah dilaksanakan Rapat persiapan Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 30 Maret 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.
 - Telah dilaksanakan kegiatan Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 5 s.d 9 April 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.
 - Telah dilaksanakan kegiatan Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 4 s.d 11 September 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.
 - Telah dilaksanakan evaluasi Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan tanggal 19 November 2021 di Jakarta.
- d) Pengerahan Potensi dan Pengendalian Bencana dan Kondisi Membayakan Manusia
- Telah dilaksanakan kegiatan Insarag Meeting Group National Accreditation Process (NAP) tgl 27 s.d 29 Mei 2021 di Bekasi.
 - Telah dilaksanakan kegiatan Asistensi Mentoring National Accreditation Process (NAP) tgl 13 s/d 18 September 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado.
 - Telah dilaksanakan kegiatan Asistensi Mentoring National Accreditation Process (NAP) tgl 20 s/d 25 September 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram.

- Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan dan Penyiapan Bahan Laporan National Accreditation Process (NAP) tgl 16 s/d 17 November 2021 di Jakarta.
- e) Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (PN)
 - Telah dilaksanakan kegiatan dukungan pengerahan dan pengendalian operasi SAR yaitu:
 - Operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Tanggal 9 s.d 22 Januari 2021.
 - Operasi SAR Banjir di Jabodetabek pada tanggal 20 - 26 Februari 2021.
 - Operasi SAR Bencana Gempa di Mamuju dan Majene pada tanggal 16 s.d. 22 Januari 2021.
 - Operasi SAR Banjir di Jabodetabek pada tanggal 20 - 26 Februari 2021
 - Telah dilaksanakan kegiatan dukungan pengerahan dan pengendalian operasi SAR yaitu:
 - Operasi SAR Kecelakaan Kapal MV Barokah Jaya Tabrakan dengan MV Habco Pioneer di perairan Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 3 s.d 12 April 2021.
 - Operasi SAR Kecelakaan Kapal Selam KRI Nanggala-402 tenggelam di Perairan Laut Bali tanggal 21 s.d 28 April 2021.
 - Operasi SAR Bencana Banjir di Kab Flores Timur, Kabupaten Alor dan Kab Lemebata, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 7 s.d 19 April 2021.
 - Operasi SAR Kondisi membahayakan Manusia Orang Hanyut di Sungai Batang Gadis Desa Pasar Laru, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara pada tanggal 20 s.d 21 mei 2021.
 - Telah dilaksanakan dukungan kesiapan BSG dalam menghadapi pengerahan dan pengendalian operasi SAR berupa kegiatan *public Safety Diving personel* BSG di Bekasi Jawa Barat pada tanggal 27 September s.d 4 Oktober 2021.

- Telah dilaksanakan dukungan pengerahan dan pengendalian operasi SAR dalam rangka Kesiapan latihan simulasi keselamatan di Mandalika.
- 2) **IKSS6** “Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” kegiatan-kegiatan yang mendukung meliputi:
- a) **Diklat Pencarian dan Pertolongan (Diklat SAR)**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi personil Basarnas maka diselenggarakan Diklat SAR secara berkesinambungan. Diklat SAR dilaksanakan guna meningkatkan keterampilan *rescuer* dalam melakukan evakuasi penanganan kecelakaan/bencana. Berikut Diklat SAR yang diselenggarakan Basarnas selama Tahun 2021:

 - Profisiensi Instruktur Bidang Water Rescue pada tanggal 26 s.d. 28 Januari 2021 di Situ Tunggilis Cilengsi dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.
 - Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Rescuer Terampil Angkatan III pada tanggal 31 Januari s.d. 7 Februari 2021 di Balai Diklat Basarnas dan Cibubur dengan jumlah peserta sebanyak 43 orang.
 - Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Rescuer Mahir Angkatan II pada tanggal 7 s.d. 14 Februari 2021 di Balai Diklat Basarnas dan Cibubur dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang.
 - Diklat Sar Tingkat Dasar Angkatan LXXIV pada tanggal 7 Maret s.d. 16 April 2021 di Balai Diklat Basarnas, Tanjung Sari, Gunung Salak dan Buperta Cibubur dengan jumlah peserta sebanyak 109 orang.
 - Profisiensi Instruktur Bidang Pengoprasian Alat Komunikasi pada tanggal 7 s.d. 9 Juli 2021 di Balai Diklat Basarnas dan Tanjungsari dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang.
 - Diklat Medical First Responder Angkatan XXIII & Angkatan XXIV pada tanggal 19, 20, 23 s.d. 27 Agustus 2021 dan 29 Agustus s.d. 9 September 2020 secara virtual dan di Balai Diklat Basarnas dengan jumlah peserta sebanyak 48 orang.
 - Diklat Sar Tingkat Dasar Angkatan LXXV & Angkatan LXXVI pada tanggal 26 September s.d. 9 November 2021 di Balai Diklat Basarnas,

Tanjung Sari, Gunung Salak dan Buperta Cibubur dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang.

- Diklat Sar Tingkat Dasar Angkatan LXXVII , LXXVIII & LXXIX , LXXX pada tanggal 1 November s.d. 27 Desember 2021 di Balai Diklat Basarnas, Tanjung Sari, Gunung Salak dan Buperta Cibubur dengan jumlah peserta sebanyak 155 orang.
- Diklat Dasar Jabatan Fungsional Tertentu Instruktur Balai Diklat Basarnas 8 November s.d. 25 Desember 2021 di Balai Diklat Basarnas dan Hotel Puncak Raya Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang.

b) Penyiapan Tenaga SAR

- Telah dilaksanakan rapat pembinaan kompetensi tenaga rescuer pada bulan Februari 2021.
- Telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Refreshment Rotary Wing (Single Engine R44 dan Multi Engine AS355) Serta Initial Type Rating Multi Engine AS365 terhadap 2 (dua) orang Pilot ASN
- Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut ANT-II dan ATT-II di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP).
- Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Perawatan Luka Dasar Bagi Perawat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 18 s.d 22 September 2021 di Hotel Amarossa Bekasi.
- Telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut ANT-II dan ATT-II di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) dari tanggal 25 Mei - 28 Oktober 2021.
- Telah dilaksanakan Training For Crew Helicopter di Satud PP serta Lanudal Tanjung Pinang dan Surabaya.
- Telah terlaksana pembayaran PPNPN tenaga pengawakan kapal dari bulan Januari s.d. Desember 2021.
- Telah terlaksana pembayaran PPNPN tenaga pendukung Pencarian dan Pertolongan dari bulan Januari s.d. Desember 2021.

- c) Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
 - Telah dilaksanakan kegiatan Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 8 s.d 12 Maret 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya.
 - Telah dilaksanakan Rapat persiapan Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 30 Maret 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.
 - Telah dilaksanakan kegiatan Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 5 s.d 9 April 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.
 - Telah dilaksanakan kegiatan Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 4 s.d 11 September 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap.
 - Telah dilaksanakan evaluasi Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan tanggal 19 November 2021 di Jakarta.
- d) Pengerahan Potensi dan Pengendalian Bencana dan Kondisi Membayakan Manusia
 - Telah dilaksanakan kegiatan Insarag Meeting Group National Accreditation Process (NAP) tgl 27 s.d 29 Mei 2021 di Bekasi.
 - Telah dilaksanakan kegiatan Asistensi Mentoring National Accreditation Process (NAP) tgl 13 s/d 18 September 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado.
 - Telah dilaksanakan kegiatan Asistensi Mentoring National Accreditation Process (NAP) tgl 20 s/d 25 September 2021 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram.
 - Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan dan Penyiapan Bahan Laporan National Accreditation Process (NAP) tgl 16 s/d 17 November 2021 di Jakarta.
- e) Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (PN)
 - Telah dilaksanakan kegiatan dukungan pengerahan dan pengendalian operasi SAR yaitu:

- Operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Tanggal 9 s.d 22 Januari 2021.
- Operasi SAR Banjir di Jabodetabek pada tanggal 20 - 26 Februari 2021.
- Operasi SAR Bencana Gempa di Mamuju dan Majene pada tanggal 16 s.d. 22 Januari 2021.
- Operasi SAR Banjir di Jabodetabek pada tanggal 20 - 26 Februari 2021
- Telah dilaksanakan kegiatan dukungan pengerahan dan pengendalian operasi SAR yaitu:
 - Operasi SAR Kecelakaan Kapal MV Barokah Jaya Tabrakan dengan MV Habco Pioneer di perairan Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 3 s.d 12 April 2021.
 - Operasi SAR Kecelakaan Kapal Selam KRI Nanggala-402 tenggelam di Perairan Laut Bali tanggal 21 s.d 28 April 2021.
 - Operasi SAR Bencana Banjir di Kab Flores Timur, Kabupaten Alor dan Kab Lemebata, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 7 s.d 19 April 2021.
 - Operasi SAR Kondisi membahayakan Manusia Orang Hanyut di Sungai Batang Gadis Desa Pasar Laru, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara pada tanggal 20 s.d 21 Mei 2021.
- Telah dilaksanakan dukungan kesiapan BSG dalam menghadapi pengerahan dan pengendalian operasi SAR berupa kegiatan *public Safety Diving personel* BSG di Bekasi Jawa Barat pada tanggal 27 September s.d 4 Oktober 2021.
- Telah dilaksanakan dukungan pengerahan dan pengendalian operasi SAR dalam rangka kesiapan latihan simulasi keselamatan di Mandalika.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja 2021 dengan Renstra Basarnas

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sesuai perumusan indikator kinerja Basarnas yang telah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Basarnas / Rencana Strategis Basarnas 2020-2024, maka capaian target adalah sebagai berikut:

Tabel.3.17. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra Strategis Basarnas

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	1 Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	30,98%	34,75%	112,17%	45,77%	36,11%	78,89%									
		2 Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	92,89%	89,03%	95,84%	92,89%	87,82%	94,54%									
		3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	100%	90,38%	90,38%	100%	98,67%	98,67%									



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	83,33	87,01	104,42%	83,67	88,12	105,31%									
3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	1 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	27,2 menit	16,29 menit	140,11%	27 menit	18,07 menit	133,07%									
		2 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%	99,18%	99,18%	100%	98,64%	98,64%									

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2021, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah meredesain Sistem Perencanaan Penganggaran dan menindaklanjuti redesain tersebut dengan menentukan RO KRO seperti telah dijelaskan pada Bab II. Dalam menentukan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, didukung oleh 2 Program tersebut.

Tabel.3.18. Perubahan Program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Semula	Menjadi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Dukungan Manajemen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Basarnas	
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

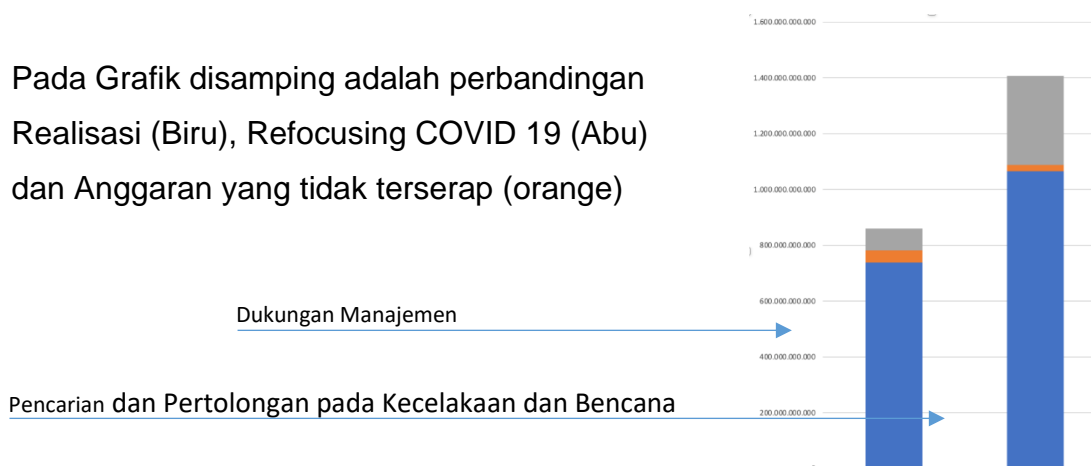
Tabel.3.19. Pagu Anggaran dan Refocusing Covid-19

PROGRAM	PAGU ALOKASI ANGGARAN	REFOCUSING COVID 19	PAGU AKHIR
Dukungan Manajemen	859.573.479.000	77.775.717.000	781.797.762.000
Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.407.886.781.000	320.370.306.000	1.087.516.475.000
TOTAL	2.267.460.260.000	398.146.023.000	1.869.314.237.000

Tabel.3.20. Realisai Pagu Anggaran TA 2021

PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Dukungan Manajemen	781.797.762.000	737.519.353.718	94,34
Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.087.516.475.000	1.065.433.746.457	97,97
TOTAL	1.869.314.237.000	1.802.953.100.175	96,45

Pada Grafik disamping adalah perbandingan Realisasi (Biru), Refocusing COVID 19 (Abu) dan Anggaran yang tidak terserap (orange)



Basarnas mendapatkan pagu alokasi anggaran TA 2021 sebesar Rp 2,26 triliun. Pagu alokasi anggaran tersebut sampai dengan bulan Agustus 2021 mengalami 4 kali pemotongan yaitu refocusing tahap I sebesar Rp 102,28 miliar, tahap II sebesar Rp 26,51 miliar, tahap III sebesar Rp 13,66 miliar dan tahap IV sebesar Rp 255,67 miliar, sehingga total pemotongan TA 2021 sebesar Rp 398,12 miliar.

Pagu Basarnas **setelah refocusing** adalah sebesar Rp 1,86 triliun yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen mengalami pemotongan sebesar Rp 77,76 miliar sehingga menjadi Rp 781,79 miliar;
2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana mengalami pemotongan sebesar Rp 320,37 miliar sehingga menjadi Rp 1,08 triliun

Walaupun Anggaran telah Direfocusing sampai dengan 40%, Basaras tetap dapat meningkatkan Kinejanya, tetapi kondisi ini tidak dapat terus dilakukan dalam Jangka Panjang dikarenakan terkait:

- Pemeliharaan Peralatan SAR dan Gedung SAR
- Kebutuhan Minimal Alat Utama
- Pengembangan Kualitas Pegawai
- Pengembangan Kantor Pencarian dan Pertolongan
- Perkembangan Teknologi di Lingkuagn Basarnas

Sedangkan **program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan adalah program teknis untuk mencapai sasaran strategis Basarnas**. Beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis Basarnas tersebut yaitu:

- Kegiatan pengadaan sarana SAR baik sarana SAR khusus, laut, darat maupun udara;
- Kegiatan pengadaan peralatan komunikasi;
- Kegiatan pemeliharaan sarana SAR;
- Kegiatan pemeliharaan peralatan komunikasi;
- Kegiatan pengerahan dan pengendalian SAR;
- Kegiatan siaga SAR;
- Kegiatan Diklat SAR.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis Basarnas Tahun 2021 yaitu berupa rapat koordinasi, workshop, dan sosialisasi.

Pada ilustrasi berikut ini adalah Kegiatan-kegiatan Prioritas Nasional yang ada di **Program Teknis yang tertunda di TA 2021** dan akan di lanjutkan pada Tahun 2022



TOTAL :
134.112.057.645

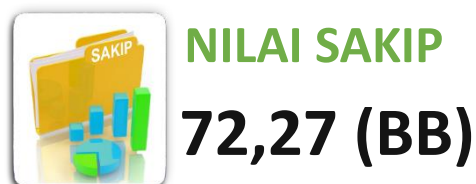
D. Kinerja Lainnya

Selama Tahun 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memperoleh capaian dan penghargaan di berbagai bidang. Penghargaan-penghargaan tersebut adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 terdapat peningkatan indeks penilaian reformasi birokrasi yaitu 76,85 dengan kategori BB, berdasarkan surat Kementerian PAN RB Nomor B/19/M.RB.06/2021 Tanggal 31 Maret 2021.



2. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 terdapat peningkatan indeks penilaian SAKIP yaitu 72,27 dengan kategori BB, berdasarkan surat Kementerian PAN RB Nomor B/22/M.AA.05/2021 Tanggal 31 Maret 2021.



3. Hasil pengawasan kearsipan pada Instansi Pemerintah tingkat pusat Tahun 2021 yaitu mendapatkan nilai 78,91 dengan kategori BB (Sangat Baik) dari Kepala Arsip Nasional RI pada tanggal 31 Desember 2021.



INDEKS AUDIT

78,91 (BB, Sangat Baik);

4. Anugerah Meritokrasi dengan predikat Baik, dan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan nilai 262,5 pada tanggal 7 Desember 2021.



NILAI MERIT

262,5

5. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Smart Dja dari Kementerian Keuangan



NILAI SMART

93,8 %

6. Peringkat 2, Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara, Kategori Perencanaan kebutuhan pelayanan, pengadaan, kepangkatan dan pensiun pada BKN Awards 2021.



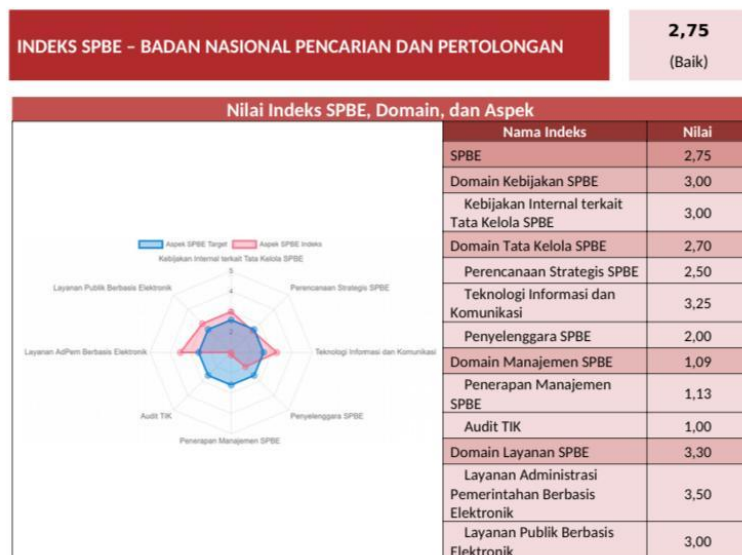
7. Opini WTP atas Laporan Keuangan Basarnas Tahun 2021 dari BPK pada tanggal 24 Mei 2021.



8. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas yaitu pada Tahun 2021 sebesar 2,75 dengan katerori Baik oleh Kementerian PAN RB pada tanggal 24 Desember 2021.



NILAI SPBE
2,75 (BAIK)



9. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan nilai 89,90.



INDEKS KIP

89,90 (MENUJU INFORMATIF)

MENUJU INFORMATIF		
KATEGORI LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	89,90
2	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	89,37
3	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	82,13
4	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LEMHANNAS)	81,87
5	MAHKAMAH AGUNG RI	81,76
6	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	80,02

10. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dari Kementerian PAN RB tanggal 20 Desember 2021.



11. Evaluasi Pelayanan Publik tahun 2020 dengan Predikat Sangat Baik dari Kementerian PAN RB pada tanggal 9 Maret 2021.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
Kementerian/Lembaga Berpredikat Sangat Baik	
Instansi K/L	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Balai Besar POM di Denpasar
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
Kementerian Kesehatan	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta
Badan Informasi Geospasial (BIG)	Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial
Kementerian Kelautan dan Perikanan	PTSP KKP
Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Kantor Pertanahan Kota Bogor
Kementerian Sekretariat Negara	Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan
Badan Narkotika Nasional	Balai Besar Rehabilitasi Lido
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Direktorat Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Mahkamah Agung	Pengadilan Negeri Denpasar
Lembaga Administrasi Negara	Politeknik STIA LAN Jakarta
Mahkamah Konstitusi	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Kejaksaan Agung	Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Badan Siber dan Sandi Negara	Balai Sertifikasi Elektronik

BAB IV PENUTUP

Pada Bab sebelumnya telah dibahas tentang pelaksanaan kegiatan serta capaian kinerja yang telah dicapai oleh Basarnas selama periode Tahun 2021. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi guna mencapai realisasi kegiatan sesuai dengan target.

Berikut ini akan dibahas tentang rekomendasi terhadap yang dihadapi oleh Basarnas selama periode Tahun 2021. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai perbaikan baik untuk pelaksanaan kegiatan maupun capaian kinerja Basarnas tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat beberapa rekomendasi dan tindak lanjut, adapun rekomendasi dan tindak lanjut tersebut antara lain:

A. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sesuai Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor **B/22/M.AA.05/2021** tanggal **31 Maret 2021** tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memberikan rekomendasi sebagai berikut:

No.	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menetapkan Indikator Kinerja Utama, baik untuk level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Unit Kerja Eselon I, maupun Unit Kerja Mandiri di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Telah ditetapkan dan di upload di esr.menpan.go.id .: 1. Surat Keputusan Nomor: SK.KBSN-192/PR.01.03/IX/BSN-2020 tentang IKU BASARNAS 2. Surat Keputusan Nomor: SK.KBSN-193/PR.01.03/IX/BSN-2020 IKI BASARNAS 3. Surat Keputusan Nomor: SK.KBSN-196/PR.01.03/IX/BSN-2020 IKI UPT BASARNAS

No.	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut
2	Melakukan perbaikan atas Indikator Kinerja pada Unit Kerja yang belum memenuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik, maupun yang belum cukup untuk menggambarkan kinerja yang diharapkan pada Unit Kerja tersebut.	Telah dilaksanakan Reviu IKU dengan mengundang perwakilan masing-masing unit kerja Kantor Pusat, serta asistensi dari Kemenpan RB. Reviu IKU telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor: SK.KBSN-154/OT.01/VI/BSN-2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
3	Seluruh Unit Kerja terkecil, agar menetapkan rencana aksi atas kinerja organisasi yang diperjanjikan.	Telah disusun dokumen Rencana Aksi dan Pemantauan Rencana Aksi mulai dari level Lembaga, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II sampai dengan UPT dan sudah di upload di esr.menpan.go.id
4	Meningkatkan budaya manajemen kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sehingga Perjanjian Kinerja bukan lagi sekedar hanya formalitas/sebuah dokumen, namun sebagai bentuk komitmen kinerja yang ingin dicapai sehingga secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian target kinerja yang diperjanjikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan IKI atas dasar PP 30 tahun 2019 PeremenPANRB No 8 Tahun 2021 telah dipelajari, menyusun Dialog Kinerja, Matrik Peran Hasil telah dilaksanakan pada saat menyusun SKP 2021 2. Telah dilaksanakan Penilaian UPT . Penilaian tersebut direncanakan untuk pemberian apresiasi/penghargaan dengan harapan dapat meningkatkan budaya kinerja di lingkungan Basarnas.

No.	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut
5	Mengembangkan aplikasi teknologi informasi e-kinerja sehingga dapat mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan revaluasi capaian kinerja secara berkala.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basarnas telah membangun aplikasi e-performance yang terintegrasi dengan aplikasi simonev. Aplikasi e-performance meliputi <ul style="list-style-type: none"> • dokumen perencanaan, • pengukuran kinerja berbasis anggaran • laporan kinerja. 2. Aplikasi e-kinerja sedang disusun oleh Bagian Kepegawaian, Biro Hukum dan Kepegawaian
6	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan diklat penyusunan Laporan Kinerja dengan BPKP pada tanggal 19 s.d. 23 Agustus 2019 di Ruang Serbaguna Lantai 15 Basarnas yang diikuti oleh perwakilan masing-masing dari Unit Kerja Kantor Pusat. 2. Telah dilaksanakan diklat penyusunan Laporan Kinerja pada tanggal 20 s.d. 24 Januari 2020 di Pusdiklat Pengawasan BPKP , Ciawi yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing Satker 3. Telah dilaksanakan Finalisasi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang

No.	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut
		<p>dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 Februari 2021 di Tangerang, yang diikuti dari perwakilan masing masing UPT.</p> <p>4. Untuk Tahun 2021 diklat penyusunan Laporan Kinerja belum dilaksanakan hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19.</p>
7	Menguatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> .	<p>1. Telah dilaksanakan sosialisasi dan asistensi pengisian aplikasi e-performance untuk memantau capaian kinerja setiap bulannya.</p> <p>2. Telah dilaksanakan sosialisasi PP 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Permenpan 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS dengan mengundang Narasumber dari Kementerian PAN-RB Telah dilaksanakan sosialisasi penyusunan SKP oleh Biro Hukum dan Kepegawaian dan Biro Perencanaan Basarnas</p>

Pada akhir Tahun 2021 Basarnas dipandu oleh Tim dari Kementrian PAN RB telah menyusun SKP sesuai format yang tertuang dalam Peraturan Kementrian RB no 8 tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai. Materi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan PP 30/2019 dan PermenPANRB

Sistem Manajemen Kinerja PNS disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenpan RB dan Analis Kebijakan Ahli Pertama.

B. Transformasi SKP

Di dalam PP 46/2011 Jo Perka 1 Tahun 2013, SKP memuat kegiatan tugas jabatan berbasis aktivitas dan merupakan penyusunan kegiatan tugas jabatan berdasarkan tugas dan fungsi. Di dalam PP 30/2019 jo PERMENPANRB Sistem Manajemen Kinerja PNS SKP memuat

1. Kinerja Utama Individu: Penjabaran kinerja berdasarkan *cascading* berbasis hasil berdasarkan dialog kinerja
2. Indikator Kinerja Individu: Memperhatikan Kriteria Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi

Periode Transisi Kinerja Pegawai Tahun 2021 (SE Menpan No 3/2021) PP 46/2011 jo. Perka BKN 1/2013 dipakai untuk menyusun **SKP Januari – Juni 2021**. PP 30/2019 jo PermenPANRB SMK PNS disusun untuk penyusunan **SKP Juli – Desember 2021**

- Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), SKP disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan Renstra dan RKT
- Untuk Jabatan Administrasi, SKP disusun berdasarkan SKP Atasan Langsung dengan memperhatikan OTK dan Uraian Jabatan
- Untuk Jabatan Fungsional, SKP disusun berdasarkan SKP Atasan Langsung dan Organisasi/unit kerja dengan memperhatikan RKT, PK, OTK, Uraian Jabatan dan butir-butir kegiatan JF
- Untuk Jabatan Fungsional yang merangkap Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan lainnya, SKP disusun mengikuti jabatan JPT, JA atau Jabatan lainnya dan dapat menyusun SKP JF;

Dalam menyusun SKP Juli-Desember 2021 tersebut seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memulai langkah langkah sebagai berikut:

- Melaksanakan Dialog Kinerja dan menuangkannya ke dalam MyMap
- Menuangkan ke dalam Matrik Peran Hasil
- Dari Uraian pada matrik tersebut dijadikan Indikator Kinerja Individu / Butir butir kegiatan yang tertuang ke dalam SKP
- Untuk jabatan Fungsional disesuaikan dengan Butir butir Kegiatan Angka Kredit sesuai Instansi pembina Jabatan Fungsional

PP 30 Tahun 2019 (PENILAIAN KINERJA)

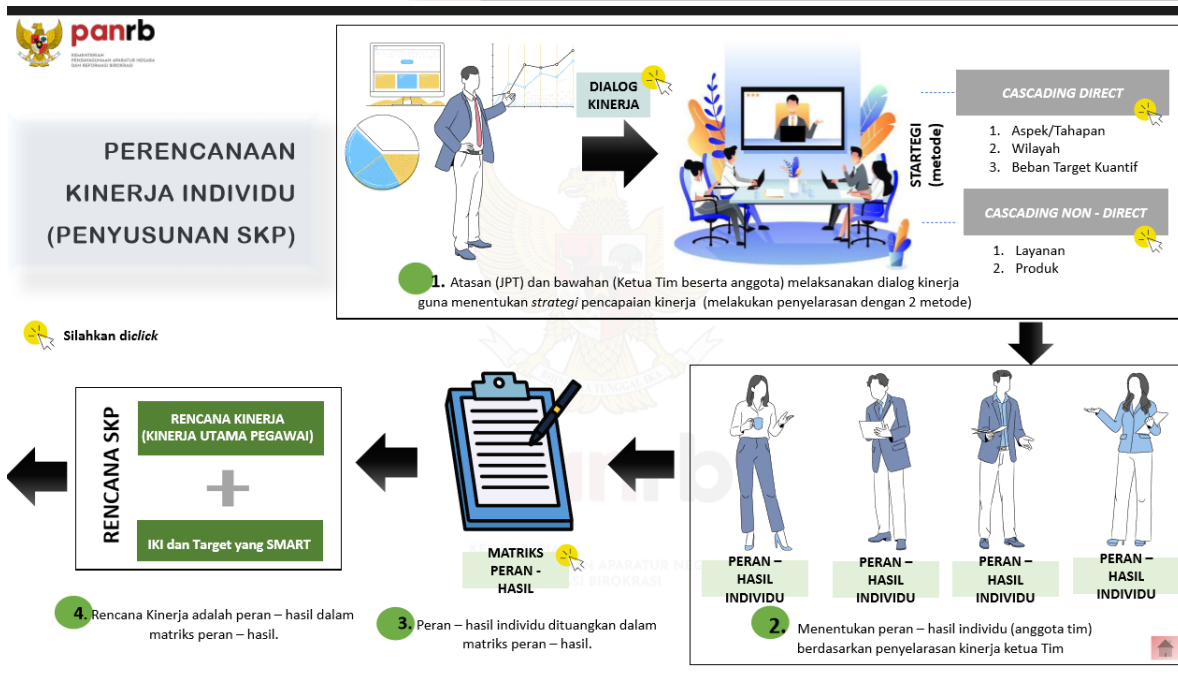
PERMENPAN RB NO 8 TAHUN 2021 (MANAJEMEN KINERJA PNS)

Pengangkatan 72 jabatan Fungsional di Basarnas

Penajaman IKU (Rekomendasi Akuntabilitas)

PENYUSUNAN SKP

ALUR/ JENIS JABATAN	BERDASARKAN	MEMPERHATIKAN	DISETUJUI	PASAL
JPT	Perjanjian Kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya	1. Renstra 2. RKT	1. JPT Utama : Menteri yang mengkoordinasikannya 2. JPT Madya : Pimpinan IP 3. JPT Pratama : Pejabat Pim. Madya 4. Memimpin Unit Kerja : Menteri / Pejabat Pimpinan Tinggi yang mengkoordinasikannya	☑
JA	SKP Atasan Langsung	1. OTK 2. Uraian Jabatan	Atasan Langsung	☑
JF	1. SKP Atasan Langsung 2. Organisasi/unit kerja	1. RKT 2. PK 3. OTK 4. Uraian Jabatan 5. Butir – butir kegiatan JF	Atasan Langsung	☑
JF Rangkap	Membuat 2 SKP yaitu: 1. SKP JA/ JPT; dan 2. SKP JF			



C. Kesimpulan dan Upaya Perbaikan

Laporan Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif baik pemerintah maupun masyarakat.

Capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 secara keseluruhan yaitu 101,52%. Dari 6 (enam) indikator kinerja tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian lebih dari 100%, 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian antara 94% - 98% dan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian 78%. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan melakukan beberapa upaya guna mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator masing-masing, diantaranya yaitu peningkatan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas, melaksanakan latihan pencarian dan pertolongan, koordinasi dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan, serta memberikan pelatihan-pelatihan bagi Tenaga Pencarian dan Pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan maupun instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif.

D. Daftar Pustaka

- Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Jakarta.
- Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186*. Jakarta.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Indonesia. 2017. *Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SP-DIPA-107.01/2021 Tahun 2021*. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP*. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.